



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2022**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya ditengah pemulihan pasca Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar pada saat pemulihan Pandemi Covid-19 baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 ini bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 27 Maret 2023

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Tlp. (0361) 234876 Fax. (0361) 227160
www.denpasarkota.go.id email: inspektorat@denpasarkota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar selaku penyusun laporan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Denpasar, 24 Maret 2023

Inspektur Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN REVIU	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR.....	3
1. Kondisi Geografis	3
2. Kondisi Demografis	4
3. Pertumbuhan Ekonomi	7
D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI	8
1. Kewenangan.....	8
2. Tugas Pokok.....	9
3. Struktur Organisasi	10
E. Aparatur Pemerintah	10
1. Berdasarkan Eselonisasi	11
2. Berdasarkan Pendidikan	11
3. Berdasarkan Jenis Jabatan	12
4. Berdasarkan Golongan.....	12
F. SISTEMATIKA PELAPORAN	12
1. BAB I PENDAHULUAN	12
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
4. BAB IV PENUTUP	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
C. Formula Perhitungan Capaian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	23
B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	26
C. Akuntabilitas Keuangan	75
D. Analisa Efisiensi	78
BAB IV PENUTUP.....	81
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin (2020-2022).....	5
Tabel 1.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2020-2022	7
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Tahun 2020-2022 Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar.....	15
Tabel 2.2	Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022.....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 ..	18
Tabel 2.4	Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	20
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022	23
Tabel 3.2	Kategori Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	27
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	29
Tabel 3.5	Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2021 - 2022 menurut Kabupaten/Kota	30
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	31
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Mengentaskan Kemiskinan	33
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	35
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Menurunnya Kasus Kriminalitas.....	40
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Ketahanan Pangan	42
Tabel 3.11	Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 tingkat Kota se Nasional	42
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	44
Tabel 3.13	Analisis Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	46
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas.....	48
Tabel 3.15	Persentase Pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota	49
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Mengurangi Pengangguran	50
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	53
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Inovasi Daerah	55
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	57
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	61
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	71
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2022	75



Tabel 3.23	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar.....	77
Tabel 3.24	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Luas Daerah menurut Kecamatan (%) 2022	4
Gambar 1.2 Grafik Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar 2018 – 2022	5
Gambar 1.3 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar 2018-2022	6
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar	10
Gambar 3.1 Diagram Capaian Kinerja Kota Denpasar Tahun 2022.....	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2022 merupakan Tahun awal dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 16 Sasaran dan 17 Indikator Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- **Misi 1. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- **Misi 2. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target) dan 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target) yang masih memakai nilai tahun 2021 dikarenakan data belum rilis dari BPS.
- **Misi 3. terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target).

- **Misi 4. terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 4 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- **Misi 5. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 17 indikator sasaran, diketahui bahwa 7 indikator atau 41,18% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 9 indikator atau 52,94% kategori Baik, 1 indikator atau 5,88% kategori Baik Sekali namun masih memakai data tahun 2021. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 termasuk dalam Kategori “Baik”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022, serta hasil reviu sasaran dan indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LKjIP Tahun 2022 menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar adalah :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta

- Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR

1. Kondisi Geografis

Kota Denpasar memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian sehingga menjadi titik pusat kegiatan dan penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar dibentuk pada tanggal 15 Januari 1992 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar. Sebagai Ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
- Sebelah timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
- Sebelah selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
- Sebelah barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara geografis Kota Denpasar terletak di antara 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur dengan luas wilayah 12.778 Ha (2,27 persen dari luas wilayah Provinsi Bali) yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12% dari total luas wilayah Kota

Denpasar). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,59%), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,83%). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 km² (17,46 %). Selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Diagram Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2022



Sumber : Kota Denpasar Dalam Angka, 2022

2. Kondisi Demografis

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembangunan dibidang kependudukan bukanlah hal yang mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Beban tersebut diantaranya pengangguran yang tinggi, kriminalitas meningkat dan perekonomian yang buruk. Selain kualitas penduduknya, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk juga sudah menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Denpasar. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur, maupun sebaran antar wilayahnya.

Dari segi jumlah, penduduk Denpasar cukup banyak dibandingkan jumlah total penduduk Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 726.900 orang di tahun 2022, angka ini hampir mencapai 16% dari jumlah penduduk Bali yang berjumlah sekitar 4,41 juta orang (Proyeksi BPS 2022). Kota Denpasar diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Kotamadya pada tanggal 27 Februari 1992 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992. Dengan

demikian Sensus Penduduk yang pertama kali dilaksanakan di Kota Denpasar (setelah lepas dari Kabupaten Badung) adalah Sensus Penduduk tahun 2000. Pada pelaksanaan Sensus Penduduk di tahun 2000, jumlah penduduk Denpasar hanya sebesar 532.000 jiwa. Jumlah ini terus bertambah, hingga di tahun 2022.

Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021 -2022 (ribu jiwa)

Jenis Kelamin	2021	2022
Laki - laki	366.9	367.0
Perempuan	359.7	359.9
Jumlah	726.6	726.9

Sumber: Pyoyeksi Interim Penduduk, BPS Kota Denpasar, 2022 (Data diolah)

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada Tahun 2022 mencapai 726.900 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 367.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 359.900 jiwa.

Ditinjau dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/sex ratio (SR) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Denpasar relatif berimbang, meskipun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Selama kurun waktu 2021-2022, sex ratio penduduk Denpasar berada pada kisaran 102. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan terdapat 102 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Gambar 1.2 Grafik Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar, 2018 - 2022



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS 2022

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 0,12%. Secara rinci grafik trend laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar 2018-2022



Sumber : BPS data diolah 2022

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Sebaran penduduk relatif lebih dipengaruhi oleh pola migrasi baik migrasi ke luar maupun migrasi masuk. Gambaran piramida penduduk Denpasar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk Denpasar lebih dipengaruhi oleh faktor non-alamiah yakni migrasi. Perkembangan piramida penduduk yang cenderung melebar antara tahun 2015 dan 2022, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur, bukan semata diakibatkan oleh pergeseran antar kelompok umur (kohor), namun akibat penambahan dari penduduk luar di masing masing kelompok umurnya.

Ketimpangan sebaran penduduk juga dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Denpasar tergolong kota yang sangat padat di Provinsi Bali. Dengan luas yang kurang dari 3% (127,27 km) dari total luas wilayah Bali (5.780,06 km), kepadatan penduduk Denpasar di tahun 2022 mencapai 5.688 jiwa per km². Angka ini sangat jauh di atas tingkat kepadatan Provinsi Bali yang hanya sebesar 764.000 jiwa per km².

Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2020-2022

Uraian	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2020	725,3	5.676
2021	726,6	5.686
2022	726,8	5.688

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2022

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Denpasar merupakan yang terbesar di Bali karena menjadi pusat pemerintahan dan Ibu Kota Provinsi Bali. Pada Tahun 2022 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 6,44 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 112,65 (2018=100) pada November 2022 menjadi 113,17 pada Desember 2022. Sementara itu, tingkat Inflasi tahunan Kota Denpasar dari tercatat masing-masing setinggi 2,01 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 6,44 persen pada tahun 2022 naik 4,43 persen.

Tabel 1.3 Tingkat Inflasi Tahun 2020-2022 Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar.

11 Kelompok Pengeluaran Inflasi	Inflasi Tahunan Kota Denpasar Menurut 11 Kelompok Pengeluaran (Persen)		
	2020	2021	2022
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,55	3,95	6,70
Pakaian dan Alas Kaki	-0,68	-2,50	1,18
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah tangga	-0,32	-0,02	4,60
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,06	10,39	8,63
Kesehatan	1,66	0,78	2,78
Transportasi	-3,43	2,23	15,15
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,35	0,68	-1,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,02	-3,78	5,99
Pendidikan	0,61	-0,67	3,64
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,65	0,72	5,82
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,69	2,96	8,49
Umum	0,55	2,01	6,44

Sumber : BPS Bali, 2023

Jika diurai menurut penyumbangannya, inflasi Kota Denpasar Tahun 2022 yang setinggi 6,44 persen tercatat disumbang masing-masing oleh Kelompok VI (Transportasi) sebesar 15,15 persen; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sebesar 8,63 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lain) sebesar 8,49 persen; kelompok I (makanan, minuman dan tembakau) sebesar 6,70 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga dan budaya) sebesar 5,99 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) sebesar 5,82 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sebesar 4,60 persen; kelompok IX (pendidikan) sebesar 3,64 persen; kelompok V (kesehatan) sebesar 2,78 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sebesar 1,18 persen; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sebesar -1,02 persen.

Pada Tahun 2019 Pertumbuhan PDRB/ekonomi Kota Denpasar sebesar 5,82 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi -9,43. Penurunan ini terjadi di semua kabupaten/kota di provinsi Bali dikarenakan dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan turun dan lemahnya perekonomian di Bali khususnya di Kota Denpasar. Pada Tahun 2021 pertumbuhan PDRB/ekonomi Kota Denpasar sebesar -0,91 persen meningkat sebesar 8,52 persen dari tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan perekonomian bertahap pulih pasca pandemi Covid-19, untuk tahun 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar belum rilis dari Badan Pusat Statistik.

D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kewenangan

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 5 (lima) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ;

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- 1) Tenaga kerja
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Perdagangan;
- 5) Perindustrian.

2. Tugas Pokok

Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

pelayanan masyarakat per Desember Tahun 2022 sebanyak 5.901 orang, terdiri dari :

1. Berdasarkan Eselonisasi

NO	ESELON	JUMLAH
1	II.a	1
2	II.b	37
3	III.a	54
4	III.b	119
5	IV.a	133
6	IV.b	97
7	Non Eselon	5.460
JUMLAH		5.901

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2022

2. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	APDN	1
2	D.I	8
3	D.II	38
4	D.III	423
5	D.IV	60
6	D-I / A-I	1
7	D-II / A-II	21
8	D-III / A-III	7
9	PGAH	1
10	PGSD	1
9	S 1 / A IV	358
11	S1	3.528
11	S1.IIP	5
12	S2	466
13	S3	8
14	SD	71
15	SLTA	793
17	SLTP	110
18	STPDN	1
TOTAL		5.901

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2022

3. Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Fungsional	1.069
2	Guru	2.628
3	Pelaksana	1.765
4	Struktural	439
JUMLAH		5.901

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2022

4. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	67
2	II	883
3	III	2.755
4	IV	1.199
5	IX (PPPK)	997
JUMLAH		5.901

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2022

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, kewenangan, tugas pokok serta struktur Organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang rencana strategis, rencana kerja, pengukuran kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada BAB ini menguraikan tentang Realisasi Kinerja Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan secara umum atas capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar serta Langkah – Langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 :

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (sustainable), Purradhipa Bhara Bhawana yang diartikan

Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Makna Krama (manusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar. Adapun sains tekno-ekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.

Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional sebagai wadah kebudayaan didesain tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi inti dan titik tumpu perkembangan masyarakat.

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Selanjutnya berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan 6 (enam) tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3		4	
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup (Tahun)
		3	Meningkatkan pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita
		4	Mengurangi Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan (%)
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA	5	Persentase penegakan PERDA (%)
		6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)
		7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan
		8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8	Indeks Resiko Bencana
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM (%)
		10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	11	Mengurangi Pengangguran	11	Opini BPK
		12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		13		13	Indeks SPBE

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		13 Meningkatkan Inovasi Daerah	14 Predikat inovasi daerah
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	14 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	15 Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar (%)
		15 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	16 Indeks Kualitas Hidup
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	16 Meningkatkan pembangunan kebudayaan	17 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar, 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan Tahun awal dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 770.514.882.350,00 dengan realisasi sebesar Rp 637.462.472.687,73 Secara detail anggaran kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk masing-masing Tujuan/Sasaran disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	530.687.735.682,00
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	7.437.683.961,00
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	12.553.100.024,00
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	10.166.058.034,00
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	177.474.017.329,00
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	32.196.287.320,00
TOTAL ANGGARAN		770.514.882.350,00

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2022 (data diolah)

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana.

Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat

mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target kinerja. Target kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan targetnya.

Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2022 untuk 16 sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari 17 indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2022
1		2		3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414
4	Mengurangi kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2,10
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84
6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Angka	105,73
7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan	8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78

	upaya penanganan bencana				
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)
		11	Opini BPK	Opini	WTP
11	Mengurangi pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	13	Indeks SPBE	Indeks	3,5
13	Meningkatnya inovasi daerah	14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,91
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66,97

Sumber : Penetapan Kinerja Walikota Denpasar Tahun 2022

D. Formula Perhitungan Capaian Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran pencapaian ke-17 (tujuh belas) IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, maka disusun formula perhitungan IKU dan sumber data, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Indeks Pendidikan	Data Hasil Pemetaan/Survey	Hasil pemetaan/survey Badan Pusat Statistik
2	Angka Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Hasil penghitungan / survey Badan Pusat Statistik
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Data Hasil Pemetaan/Survey BPS	Hasil penghitungan / survey BPS
4	Angka Kemiskinan (%)	$\frac{\text{Banyaknya Orang Miskin}}{\text{Total Penduduk Denpasar}} \times 100\%$	Hasil penghitungan / survey Badan Pusat Statistik
5	Persentase penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100\%$	Hasil penghitungan / survey Dinas Satpol PP
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Pusat Statistik	Hasil penghitungan / survey BPS
7	Indeks Ketahanan Pangan	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Ketahanan Pangan	Hasil penghitungan / survey Badan Ketahanan Pangan
8	Indeks Resiko Bencana	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Hasil penghitungan / survey BNPB
9	Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total SKM PD/UPP}}{\text{Total PD/UPP}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
			Pelayanan Publik (UPP)
10	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori)	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB
11	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Data Hasil Pemetaan/Survey BPS	Hasil pemetaan/survey BPS
13	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN RB	Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN RB
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Hasil Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri	Hasil Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Indeks Kualitas Air} + \text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}}{3}$	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda	Hasil pemetaan/ (kompilasi) Bappeda

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 16 (enam belas) sasaran.

Formula penghitungan terhadap IKU Kota Denpasar sebagian merupakan formula yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar. Sebagian IKU mengadopsi formula pengukuran yang sudah dilaksanakan secara nasional, baik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun kementerian. Selain itu, sumber data untuk mendapatkan capaian juga berasal dari capaian yang memang hasil penghitungan dari perangkat daerah teknis maupun yang terpublikasi secara resmi dari BPS dan Kementerian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 98,37% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN							
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773	0,775	100,258	0,786	98,600
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					100,258		
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN							
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26	75,3	100,053	76,04	99,026
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :					100,053		
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT							
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414	1.985.000	87,007	2.844.242	69,790
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					87,007		
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN							
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,1	2,97	99,585	1,95	99,476
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					99,585		
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA							
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84	89,14	100,337	90,84	98,128
Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :					100,337		
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS							
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105,73	89,83	100,150	105,33	100,147
Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :					100,150		
SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN							
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4	91,82	98,308	94,6	97,061
Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :					98,308		

SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA							
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78	104,39	99,974	90,1	84,139
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					99,974		
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66	88,66	101,140	89,66	98,884
Rata-rata Capaian Kinerja 9 :					101,129		
SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI							
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	100,357	A (80)	94,712
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					100,178		
SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN							
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03*	5,08	99,990	6,62	100,2326284
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					99,990		
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI							
13	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,68	105,142	3,9	94,358
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					105,142		
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH							
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif (60)	Inovatif (55,68)	92,80	Sangat Inovatif	92,80
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					92,80		
SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR							
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58	58,92	98,892	64,86	90,841
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					98,892		
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,91	58,71	94,831	62,13	94,495
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					94,831		
SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66,97	63,85	95,341	74,84	85,315
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					95,341		

Sumber : LKjIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022

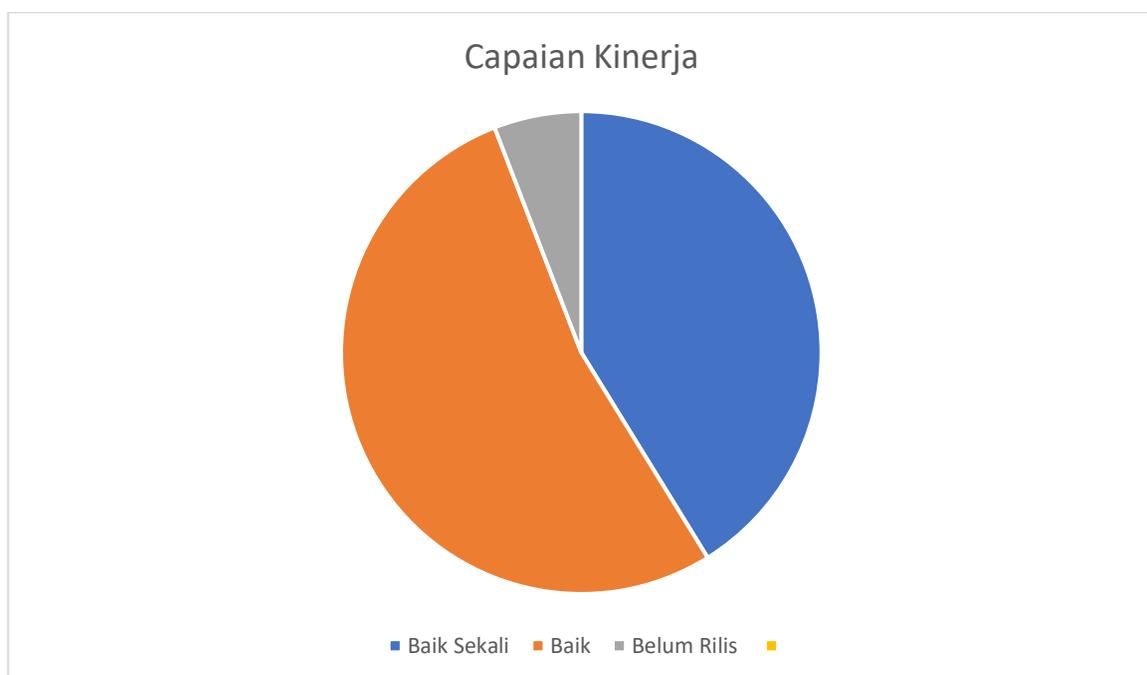
Skala penilaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 menggunakan skala seperti Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas.

Gambar 3.1 Diagram Capaian Kinerja Kota Denpasar Tahun 2022



Dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, diketahui 7 indikator atau 41,18% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 9 indikator atau 52,94% kategori Baik, 1 indikator atau 5,88% kategori Baik Sekali namun masih memakai data tahun 2021. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 98,37% atau bermakna Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 termasuk dalam Kategori “Baik”. Terdapat 1 (satu) IKU yang masih menggunakan data capaian

Tahun 2021, yaitu penilaian Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana. Dimana sampai dengan pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini disusun, hasil penilaian belum dirilis oleh BPS.

B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut.

TUJUAN 1. MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR

Untuk mewujudkan Tujuan Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar, pada Tahun 2022 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- d. Mengurangi kemiskinan

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” yang telah ditetapkan. Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN							
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773	0,775	100,258	0,786	98,600
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :						100,258	

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan terdiri dari 1 indikator sasaran yaitu Indeks Pendidikan. Untuk mendukung kesuksesan pembangunan di suatu Daerah, diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dihasilkan melalui pendidikan yang unggul dan bermutu. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia.

Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari Derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2022 yakni sebesar 84,37 tertinggi di Provinsi Bali dengan IPM Provinsi Bali sebesar 76,44. Rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar Tahun 2022 sebesar 11,50 (tahun) meningkat dari tahun 2021 sebesar 11,48. Untuk harapan lama sekolah Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 14,10 (tahun) meningkat dari tahun 2021 sebesar 14,09 (tahun). Indeks pendidikan tahun 2021 memiliki

nilai 12,78 berbeda dengan dengan tahun 2022 dengan capaian realisasi indeks pendidikan yakni 0,775. Perbandingan nilai capaian tahun lalu berbeda dengan sekarang dikarenakan terdapat perbedaan rumus dalam menentukan nilai indeks.

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	8,23	8,35	8,64
Kab. Tabanan	8,88	9,14	9,15
Kab. Badung	10,39	10,62	10,64
Kab. Gianyar	9,04	9,29	9,55
Kab. Klungkung	8,13	8,14	8,46
Kab. Bangli	7,17	7,18	7,47
Kab. Karangasem	6,32	6,33	6,67
Kab. Buleleng	7,24	7,25	7,56
Kota Denpasar	11,47	11,48	11,50
Provinsi Bali	8,95	9,06	9,39

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	12,65	12,92	13,01
Kab. Tabanan	13,00	13,01	13,03
Kab. Badung	13,98	13,99	14,03
Kab. Gianyar	13,89	13,97	14,01
Kab. Klungkung	12,99	13,00	13,02
Kab. Bangli	12,34	12,35	12,49
Kab. Karangasem	12,41	12,42	12,62
Kab. Buleleng	13,07	13,08	13,26
Kota Denpasar	14,00	14,09	14,10
Provinsi Bali	13,33	13,40	13,48

2) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kualitas Pelayanan Kesehatan merupakan gambaran kemampuan/Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN							
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26	75,3	100,05	76,04	99,02
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :						100,05	

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada Tahun 2022 yaitu 75,3 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar dapat tercapai dari beberapa indikator kesehatan yang telah dicapai yaitu:

- a. Sudah terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan di Kota Denpasar
- b. Anggaran Kesehatan perkapita pertahun di Kota Denpasar sudah cukup tinggi
- c. Anggaran Kesehatan sudah lebih dari 10% dari total APBD Kota Denpasar sesuai amanat Undang-undang.

Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Denpasar berada diatas capaian angka harapan hidup Provinsi Bali dan Nasional. Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar pada Tahun 2022 mencapai 75,3 Tahun. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 75,26 Tahun, dapat terealisasi sebesar 100,05% (Baik Sekali). Data harapan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.5 Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali
Tahun 2021 - 2022 menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)	
	2021	2022
Kab. Jembrana	72,46	72,82
Kab. Tabanan	73,75	74,10
Kab. Badung	75,18	75,51
Kab. Gianyar	73,78	74,13
Kab. Klungkung	71,41	71,83
Kab. Bangli	70,62	70,97
Kab. Karangasem	70,56	70,89
Kab. Buleleng	71,95	72,32
Kota Denpasar	74,93	75,30
Provinsi Bali	72,24	72,60

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Umur Harapan Hidup Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali yakni 75,30 Tahun.

Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, indeks pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat, pencegahan penyakit serta perawatan ibu.

Dari segi kesehatan peningkatan angka harapan hidup di dukung oleh sudah tersedianya fasilitas dan sarana kesehatan yang cukup banyak dan mudah terjangkau, tercapainya indikator SPM bidang Kesehatan, tercapainya penanganan KLB, tercapainya Desa *Universal Child Immunization* (UCI) 100% serta capaian *Universal Health Coverage* (UHC) : 99,93% dan terlaksananya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di Desa/Kelurahan.

Walaupun Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada Tahun 2022 telah melampaui target, Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya dengan cara, yaitu:

1. meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan.
2. meningkatkan jejaring layanan kesehatan.

3. meningkatkan kerjasama lintas sektor, mengoptimalkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

3) Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT							
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414	1.985.000	87,00	2.844.242	69,79
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :						87,00	

Dari tabel diatas dapat dikatakan capaian rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Denpasar belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Denpasar Tahun 2022 menjadi yang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota bahkan melebihi Provinsi Bali, seperti tabel berikut:

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah)	
	2021	2022
Kab. Jembrana	1.167,5	1.191,5
Kab. Tabanan	1.432,6	1.447,5
Kab. Badung	1.732,7	1.744,5
Kab. Gianyar	1.439,1	1.463,0
Kab. Klungkung	1.128,7	1.150,0
Kab. Bangli	1.120,1	1.142,4
Kab. Karangasem	1.017,5	1.027,8
Kab. Buleleng	1.336,2	1.352,9
Kota Denpasar	1.959,8	1.985,0
Provinsi Bali	1.382,0	1.394,2

Sumber : BPS, 2023

Untuk meningkatkannya pendapatan masyarakat Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan beberapa strategi yaitu meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, mendorong tumbuhnya investasi, mendorong tumbuhnya sektor pariwisata, mendorong peningkatan ekspor, dan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan. Dengan adanya beberapa strategi dimaksud, program yang mendukung guna mencapai strategi tersebut adalah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan UMKM, Program Promosi Penanaman Modal, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Adapun beberapa kendala dalam capaian kinerja meningkatnya pendapatan masyarakat antara lain:

1. Dalam bidang pariwisata

Adapun kendala yang dihadapi:

- Fasilitas pendukung (restoran, hiburan, tempat cinderamata) kurang memadai
- Minim tersedianya hotel berbintang sehingga kurang diminati wisata
- Fasilitas hotel yang tersedia masih kondisi lam

Solusi :

- Penataan sanur untuk membuat wisman nyaman dan semakin tertarik ke pantai sanur, sudah diterbitkan Perwali Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kawasan Pesisir Sanur agar kawasan pantai dapat lebih tertata dengan baik, termasuk menata kawasan UMKM masyarakat lokal sehingga diharapkan wisman dapat semakin banyak untuk mengeluarkan uangnya selama berwisata di Sanur.
- Denfest, sanfest, d'youth fest juga jadi salah satu upaya untuk mempertemukan wisatawan dengan UMKM lokal yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat
- Mendorong tour guide operator agar wisatawan yang datang dari cruise untuk berwisata city tour sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berbelanja di sekitar wilayah

2. Dalam bidang investasi

Adapun kendala sebagai berikut:

- Keterlambatan dalam mendapatkan realisasi investasi setiap tahunnya karena harus menunggu rilis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat.

Adapun Solusi sebagai berikut:

- Bersurat dan melakukan koordinasi dengan BKPM pusat. (PTSP) Adapun Inovasi dari PTSP adalah SIMPATIK (Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan) merupakan submission) pada DPMPTSP Kota Denpasar untuk kelancaran masyarakat dalam mengajukan proses perizinan DPMPTSP Kota Denpasar dengan melakukan terobosan melalui kegiatan inovasi SIMPATIK (Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan), dengan mendorong pihak Kecamatan untuk membangun sistem yang terintegrasi dan terkoneksi di Kecamatan sehingga mereka dapat melayani pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu :
 - Memberikan informasi terkait pelayanan perizinan berusaha
 - Memberikan pendampingan dalam pemrosesan perizinan berusaha
 - Memberikan bantuan pendaftaran perizinan melalui OSS

4) Sasaran Mengurangi kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Mengentaskan Kemiskinan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN							
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,1	2,97	99,58	1,95	99,47
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :						99,58	

Dari Tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 2,10%, capaian kinerja sasaran ini sebesar 99,58% (Baik). Angka ini paling rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten di Provinsi Bali pada gambar grafik 3.2



Sumber : BPS, data diolah 2022

Berdasarkan gambar grafik 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Angka Kemiskinan di Kota Denpasar pada Tahun 2022 dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional adalah lebih rendah. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka

Kemiskinan Kota Denpasar pada Tahun 2022 lebih rendah sebesar 1,6%. Sedangkan bila dibandingkan Nasional, Angka Kemiskinan Kota Denpasar lebih rendah sebesar 6,6%.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	12,60	14,24	15,00
Kab. Tabanan	19,11	23,11	23,46
Kab. Badung	13,75	18,52	18,28
Kab. Gianyar	21,01	25,36	24,74
Kab. Klungkung	8,76	10,19	10,89
Kab. Bangli	9,56	11,68	12,17
Kab. Karangasem	24,69	28,52	29,45
Kab. Buleleng	35,25	40,92	41,68
Kota Denpasar	20,48	29,41	30,02
Provinsi Bali	165,19	201,97	205,68

Belum tercapainya Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan diakibatkan karena terdapat bencana pandemic Covid-19 sehingga dampak kemiskinan meingkat 0,87 persen di Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya dalam penanggulangan kemiskinan, dikarenakan kemiskinan merupakan tanggung jawab baik pemerintah maupun stakeholder. Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan serta inovasi yang dilakukan dari Dinas Sosial Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Sekolah Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Lomba cerdas cermat PKH.
3. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemerlu UMKM.
4. Pemberdayaan UMKM untuk kalangan disabilitas KUBE Gantari Jaya.
5. Program pemberdayaan sosial untuk menurangi kemiskinan bersinergi dengan Denpasar-Darwin.

Tujuan 2. Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar

Tujuan terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan

di Kota Denpasar pada Tahun 2022 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA
- b. Menurunnya kasus kriminalitas
- c. Meningkatkan ketahanan pangan
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana

5) Sasaran Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA

Penegakan PERDA harus dilaksanakan karena sesuai dengan misi kedua RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar yakni Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan untuk terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar. Berikut tabel analisis sasaran Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA.

Sasaran ini terdapat pada PK Walikota Tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dimana Tahun 2022 merupakan awal dari target dan realisasi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA							
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84	89,14	100,3376857	90,84	98,12857772
Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :					100,3376857		

Dari tabel diatas diketahui bahwa Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100,33% (Baik Sekali) yang diperoleh dari target 88,84% dan terealisasi sebesar 89,14% untuk capaian persentase penegakan perda tahun sebelumnya belum ada dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun awal untuk melaksanakan perjanjian kinerja sesuai dengan RPJMD Kota Denpasar

2021-2026 dan persentase penegakan perda belum terdapat pada perjanjian kinerja sebelumnya. Realisasi 89,14 % ini di dapat dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus tersebut, sesuai dengan data penegakan perda dan perwali pada tahun 2022 di dapat hasil sebagai berikut

$$\frac{419}{470} \times 100\% = 89.14\%$$

Realisasi 89,14 % didapat dari Dari total jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perwali sejumlah 419 kasus yang terselesaikan dibagi dengan total jumlah kasus pada tahun 2022 sejumlah 470 pelanggaran dikali 100%.

Dari 470 kasus tersebut terdiri atas beberapa jenis pelanggaran, yaitu IMB sebanyak 102 kasus, pelanggaran reklame sebanyak 219, ijin usaha 10 kasus, ijin mikol sebanyak 19 kasus, ketertiban umum 75 kasus, PKL sebanyak 35 kasus, Limbah usaha sebanyak 10 kasus.

Dari total kasus tersebut dilakukan penyelesaian melalui 2 mekanisme yaitu non yustisi dan yustisi, Tindakan non yustisi dilakukan berupa pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan dan pemberian surat teguran agar mematuhi ketentuan Perda kepada pelanggar dengan total 392 surat pernyataan / Teguran. Sedangkan Tindakan yustisi dilakukan dengan melaksanakan sidang tipiring kepada 27 pelanggar perda di Kota Denpasar. Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggar yang tidak memenuhi surat panggilan pelanggaran secara yustisi yang masih dipantau proses penyidikannya.

Capaian dalam sasaran Strategis Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA sudah baik sekali dan sudah tercapai, namun ada

beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya yakni sebagai berikut:

1. Peran Sat.Pol. PP dalam Penegakan Perda dan Perwali bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi (*unpredictable*).
2. Posisi Strategis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki tingkat mobilitas pertumbuhan pembangunan, perekonomian yang sangat pesat.
3. Mobilitas penduduk pendatang yang semakin meningkat.
4. Serta faktor lainnya, seperti faktor cuaca yang tidak mendukung saat penertiban, konflik kepentingan dengan masyarakat/ormas, serta keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.
5. Dalam Pencapaian Target Indikator Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar, terdapat pula faktor yang mempengaruhi jumlah linmas yang ada di tiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, faktor tersebut dipengaruhi oleh proses perekrutan anggota linmas. Dimana berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, setiap anggota Linmas harus bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara suka rela. Sifat suka rela ini menjadi kendala dalam perekrutan anggota linmas yang mempengaruhi jumlah linmas di Kota Denpasar, yang secara langsung berdampak pada capaian rasio linmas.
6. Mengingat mobilitas penduduk yang relative tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada.
7. Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
8. Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah dengan Satpol PP.
9. Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada

Adapun Solusi yang dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bergabungnya Satuan Linmas pada masing-masing Desa/ Kelurahan dalam wadah Satpol PP.

2. Semakin baiknya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran peraturan perundang – undangan melalui alat komunikasi, media elektronik maupun media – media lainnya.
3. Mulai adanya Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Satpol PP Kota Denpasar melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah provinsi /pusat.
4. Mulai tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Denpasar untuk mentaati perundang-undangan daerah yang diterbitkan pemerintah Kota Denpasar, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Terkait permasalahan tersebut, Satpol PP secara proaktif melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait perangkat daerah khususnya insiator Perda serta meningkatkan koordinasi/sinergitas serta terus berupaya mempelajari serta memahami aturan –aturan yang dimuat dalam Perda/Perkada sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di lapangan.
6. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha termasuk melauai pembinaan dan pengawasan, serta secara berkelanjutan terus melaksanakan pembinaan teknis guna meningkatkan kompetensi aparatur Pol PP sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Memberikan sosialisai dan motivasi kerja kepada aparatur Pol PP secara intensif

Terdapat Inovasi yang ditunjukkan oleh Dinas Satpol PP Kota Denpasar sehingga realisasi sasaran strategis dapat tercapai melebihi dari target yang ditetapkan adalah **“SI GADIS”**, yang merupakan kepanjangan dari **Sinergitas Gerakan Disiplin**. Adalah upaya mewujudkan kesadaran

hukum dan disiplin dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menuju “Denpasar Harmoni”. Denpasar yang Harmoni mengandung makna Kota Denpasar sebagai kota dengan tatanan kehidupan yang tertib, tenang dan penuh keteraturan.

Sinergitas dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menjadi sangat penting, karena kesadaran hukum dan disiplin akan mampu terwujud Ketika seluruh elemen bahu membahu dan memiliki pemahaman yang sama akan arti penting supremasi hukum dalam hal ini adalah penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai upaya mewujudkan ketertiban, ketenangan dan keteraturan.

Inovasi “Sigadis” direalisasikan dan diaktualisasikan melalui serangkaian upaya penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang meliputi:

Penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang meliputi: penertiban PKL, Tunawisma, ODGJ, Pelanggaran Administrasi Kependudukan, Pelanggaran perijinan usaha serta pelanggaran lainnya.

Tindakan Pidana Ringan (tipiring), yakni sidang untuk memberikan efek “jera” terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota Denpasar yang juga dilaksanakan di banjar-banjar

Penyuluhan atau sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ke tingkat Desa/Kelurahan.

Sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui berbagai media baik cetak, elektronik maupun media social seperti website, Instagram, facebook dan media lainnya.

Penghargaan yang diraih yakni Kepala Satpol PP Kota Denpasar diberikan penghargaan atas Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Ramah HAM Terbaik dalam Pelayanan Trantibumlinmas Tahun 2022 yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.



6) Sasaran Menurunnya Kasus Kriminalitas

Risiko penduduk terkena tindak pidana (crime crite) dalam publikasi ini didefinisikan sebagai peluang penduduk terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan hasil bagi jumlah tindak pidana yang dilaporkan dengan jumlah penduduk.

Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak pidana mengisyaratkan semakin baik, karena peluang penduduk terkena tindak pidana semakin kecil.

Angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan/pidana (crime rate) memberikan gambaran besarnya risiko kejadian tindak pidana yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat.

Secara umum sejak tahun 2012 sampai dengan 2021, risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) di Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan pola menurun. Pada tahun 2012 tercatat risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) di Bali sebesar 219,36 per seratus ribu penduduk. Angka ini terus menurun hingga pada capaian terendah tahun 2018 sebesar 68,92. Risiko penduduk terkena tindak pidana mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 77,61, namun kembali menurun menjadi 66,72 per seratus ribu penduduk pada Tahun 2020 dan 61,66 per seratus ribu penduduk pada tahun 2021. Adapun analisis ketercapaian sasaran dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Menurunnya Kasus Kriminalitas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS							
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105,73	89,83	100,150	105,33	100,147
Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :					100,150		

Pada Tahun 2021, Angka risiko penduduk terkena tindak pidana sebesar **89,83** per seratus ribu penduduk. Angka pada Tahun 2022 belum rilis dari BPS terkait Statistik Kriminal Provinsi Bali. Untuk capaian tahun 2022 masih menggunakan angka capaian Tahun 2021, yaitu 89,83.

Dari analisis tabel diatas, capaian kinerja sasaran sudah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100,150 (Baik Sekali). Hal tersebut menunjukkan tingkat keamanan di Kota Denpasar harus ditingkatkan dan dijaga lagi.

Walaupun sasaran capaian kinerja sudah baik, mengingat Kota Denpasar merupakan kawasan perkotaan dan menjadi Ibu Kota Provinsi Bali, perlu adanya peningkatan sistem keamanan.

7) Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara

sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN							
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4	91,82	98,308	94,6	97,061
Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :						98,308	

Berdasarkan table diatas target Indeks Ketahanan Pangan belum sesuai dengan target yang ditetapkan mengingat Nilai Indeks Ketahanan Pangan dari Badan Ketahanan Pangan secara akumulatif menurun. Indeks Ketahanan Pangan Nasional baik Provinsi, Kabupaten/Kota memang menurun dikarenakan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan. (sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2022, Badan Ketahanan Pangan)

Tabel 3.11, Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 tingkat Kota se Nasional

Peringkat	Kota	IKP	Peringkat	Kota	IKP
1	Kota Denpasar	91,82	8	Kota Madiun	85,32
2	Kota Balikpapan	89,47	9	Kota Batam	85,23
3	Kota Salatiga	87,39	10	Kota Depok	85,07
4	Kota Semarang	87,13	11	Kota Jakarta Barat	84,67
5	Kota Bekasi	86,79	12	Kota Bukittinggi	84,66
6	Kota Pekanbaru	86,56	13	Kota Samarinda	84,66
7	Kota Jakarta Selatan	85,38	14	Kota Jakarta Timur	84,56

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2023

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan perhitungan dari Badan Ketahanan Pangan peringkat IKP Kota Tahun 2022 merupakan yang terbaik, lima kota dengan urutan **skor terbaik** adalah **Kota Denpasar (91,82)**, Balikpapan (89,47), Salatiga (87,39), Semarang (87,13) dan Bekasi (86,79). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Denpasar Tahun 2021 sebesar 93,97.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai angka 93,97 di tahun 2022 mengalami penurunan dan ini terjadi di 270 kabupaten/Kota dari 416 dan 98 Kota yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut terjadi penurunan realisasi sebesar 2,15 poin. Penurunan hal ini dikarenakan terjadinya penurunan Indeks Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2022 baik Provinsi, Kabupaten/Kota dikarenakan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Dengan adanya penurunan, Kota Denpasar masih mampu dan mendapatkan nilai IKP tertinggi di Tingkat Kota secara Nasional Tahun 2022. Hal tersebut membuktikan masih terdapat keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar.

Adapun solusi yang dilaksanakan yaitu perlu peninjauan terhadap target IKP yang akan ditargetkan dan lebih memprioritaskan penggunaan pangan lokal/dalam negeri.

8) Sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana

Kota Denpasar merupakan daerah yang sangat rawan bencana yang diakibatkan oleh alam, non alam dan juga ulah manusia. Beberapa bencana pernah melanda di Kota Denpasar di antaranya banjir, kebakaran, gempa bumi, erosi/abrasi pantai, angin puting beliung, pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan lain-lain. Cakupan pelayanan BPBD Kota Denpasar tersedia beberapa pos dan lokasi yang menyesuaikan dengan jangkauan pelayanannya.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana dan juga pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA							
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78	104,39	99,974	90,1	84,139
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					99,974		

Dari Tabel diatas Indeks Resiko Bencana Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diketahui Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana yaitu 99,97 (Baik).

Indeks Resiko Bencana mengalami penurunan dan belum mencapai target yakni dengan Indeks 104,39 dari target 101,78. Pada tahun 2021, capaian Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 sebesar 106,7 turun menjadi 104,39 pada Tahun 2022. Walaupun Indeks Resiko Bencana turun, namun belum mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2022. Indeks Resiko Bencana se Bali bisa dilihat pada table berikut:

INDEKS RESIKO BENCANA KAB/KOTA SE-BALI
TAHUN 2021 - 2022

NO	KAB/KOTA	IRB 2021	IRB 2022	KELAS RESIKO
1	Gianyar	129,79	130,56	Sedang
2	Klungkung	124,22	125,41	Sedang
3	Karangasem	123,15	129,11	Sedang
4	Tabanan	153,27	143,87	Sedang
5	Badung	101,81	103,29	Sedang

6	Buleleng	92,45	92,64	Sedang
7	Jembrana	152,62	157,92	Tinggi
8	Bangli	133,69	128,65	Sedang
9	Denpasar	106,7	104,39	Sedang
10	Bali	124,19	123,98	Sedang
11	Rata-rata Nasional	179,21	177,47	Tinggi

Sumber : BNPB Tahun 2022

Dari Tabel diatas, nilai indeks resiko Kota Denpasar Tahun 2022 sudah baik dan menurun dari Tahun 2021 dari 106,7 menjadi 104,39 namun masih belum memenuhi target sesuai yang sudah ditetapkan dengan target 101,78. Semakin turun indeks risiko bencana semakin baik dan sedikit bencana yang ada di daerah tersebut.

Dalam meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana, dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar (BPBD) telah berupaya namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selain menurunkan resiko bencana adapun indikator dari BPBD adalah tingkat waktu tanggap/respon time rate, dimana dari target 15 menit hasil yang diperoleh yakni 9 menit. Tingkat waktu tanggap terhadap penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sangat baik dan sudah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Resiko Bencana belum mencapai target dikarenakan belum tersedianya regulasi mengenai penanggulangan bencana di daerah baik dalam bentuk perda, perkara, ataupun keputusan kepala daerah.

Adapun usaha-usaha yang akan dilaksanakan untuk meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana, sehingga indeks resiko bencana mencapai target yakni:

1. Menginventarisasi data-data pemenuhan 71 indikator dalam hal pengisian indeks ketahanan daerah, yang merupakan dasar dalam menentukan indeks risiko bencana.
2. Menyiapkan rancangan awal mengenai peraturan penanggulangan bencana di daerah.
3. Menyusun maupun memperbaharui dokumen-dokumen penanggulangan bencana yang ada.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hal penanggulangan bencana melalui pelatihan.

Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Denpasar pada Tahun 2022 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

9) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang baik merupakan ukuran yang penting dalam reformasi birokrasi, maka dari itu upaya dalam perbaikan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Pelayanan Publik penting dan sangat terkait dengan mensejahterakan rakyat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan.

Untuk mewujudkan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan yang baik diharapkan hadir dalam dengan masyarakat sehingga akan mencapai tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel. 3.13 Analisis Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66	88,77	101,266	89,66	99,007
Rata-rata Capaian Kinerja 9 :					101,266		

Dari Tabel 3.13 Dapat diketahui bahwa pada tabel diatas untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik terdapat Indikator Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat. Pada Indikator Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat capaiannya diperoleh dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kesehatan, Investasi, Kependudukan dan Kategori Perangkat Daerah Lainnya. Nilai rata-rata SKM Tahun 2021 adalah 86,28 dimana berdasarkan interval kepuasan masyarakat nilai tersebut masuk ke dalam kategori kinerja unit pelayanan baik (B). Pada Tahun 2022, Nilai rata-rata SKM adalah 88,77 (Sangat Baik).

Pada Tahun 2022, penilaian SKM dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yakni, 35 Perangkat Daerah, 10 Bagian di lingkungan Setda Kota Denpasar, 11 Puskesmas di Kota Denpasar, 43 Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.

Dari data tersebut sebanyak 51 perangkat daerah mendapatkan nilai Sangat Baik dan 48 perangkat Daerah mendapatkan nilai Baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Denpasar mencapai **88,77 (Sangat Baik)**.

Capaian Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian Tahun sebelumnya yaitu meingkat sebesar 2,49 poin.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai pada perangkat daerah diharapkan mampu mendukung penilaian kinerja dari perangkat daerah tersebut. Rata-rata SKM Kota Denpasar dikukung dengan nilai SKM Perangkat Daerah yang memberikan hasil pada SKM Kota Denpasar. Dapat disimpulkan pelayanan di lingkungan Kota Denpasar sangat baik.

Adapun realisasi capaian kinerja yakni 101,266 (Baik Sekali), Pemerintah Kota Denpasar tetap meningkatkan kualitas pelayanan untuk

memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat maupun pengguna layanan.

Semua Perangkat Daerah diharapkan meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan baik berupa pemenuhan sarpras yang memadai dan inovasi yang mempercepat layanan bagi masyarakat maupun pengguna layanan. Tahun 2022 dan selanjutnya penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan hingga tingkat Desa dan Kelurahan, dengan adanya penilaian hingga ke tingkat desa dan kelurahan, diharapkan Pemerintah Kota Denpasar mampu memberikan pelayanan yang baik dan tepat sasaran serta survei kepuasan masyarakat menjadi lebih meningkat lagi.

Dari seluruh Perangkat Daerah/Unit yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

10) Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar, inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel yaitu menciptakan *Sang Sewakadarma* agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Budaya Kerja *Sewakadarma*. *Sewakadarma* adalah Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mengandung arti bahwa pengabdian dan pelayanan adalah kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat. *Sang Sewakadarma* memiliki peran dan tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator dan penghubung yang dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sejak dibangunnya inovasi *Sang Sewakadarma* pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 10 orang agen perubahan yang disebut dengan *Sang Sewakadarma* dengan kategori 4 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Mahotama, dan 6 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Utama. Di Tahun 2019, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 19 orang *Sang*

Sewakadarma, dengan kategori 2 orang sebagai *Sang Sewakadarma Mahotama*, 12 orang *Sang Sewakadarma Utama*, 4 orang *Sang Sewakadarma Madya* dan 1 orang kategori *Sang Sewakadarma Pratama*. Di Tahun 2020 jumlah Agen Perubahan Kota Denpasar mengalami peningkatan dengan jumlah 13 orang *Sang Sewakadarma* dengan kategori Mahotama sebanyak 8 orang, kategori Utama sebanyak 3 orang dan kategori Madya sebanyak 2 orang. Pada Tahun 2021, jumlah *Sang Sewakadarma* sebanyak 6 orang dengan kategori Mahotama. Pada Tahun 2022, jumlah *Sang Sewakadarma* masih 6 orang dengan kategori Mahotama.

Dengan adanya *Sang Sewakadarma* (agen perubahan) diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif di Perangkat Daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pengaruh yang baik terkait (*good governance*) di lingkungan Perangkat Daerah.

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI							
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	100,357	A (80)	94,712
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					100,178		

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran memingkatnya kapasitas akuntabilitas adalah 100,178 (Baik Sekali). Dalam meningkatkan Kapasitas Akuntabilitas didukung oleh 2 IKU yakni Predikat SAKIP dan Opini BPK.

Pada Tahun 2021, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Denpasar mendapatkan hasil 74,57. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar mendapat nilai **75,77** dengan predikat BB melebihi target yakni 75,50 dan naik 1,20 dari tahun sebelumnya. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjukkan hasil yang baik.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar Pada Tahun 2022 telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2022 namun masih dalam proses audit, namun dari Tahun 2012 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Denpasar menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 (sepuluh) kali berturut-turut dari BPK.

Adapun kiat-kiat keberhasilan untuk mencapai WTP yakni :

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
2. Memberikan sosialisasi ke Perangkat Daerah tentang Penyusunan Laporan Keuangan.
3. Berkoordinasi ke Perangkat Daerah untuk mempercepat tindak lanjut temuan BPK.
4. Mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam penyajian Laporan Keuangan.

Tujuan 4. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah di Kota Denpasar pada Tahun 2022 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mengurangi Pengangguran
- b. Optimalnya Pemanfaatan Teknologi
- c. Meningkatnya Inovasi Daerah

11) Sasaran Mengurangi Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 dari tahun 2019-2021 menyebabkan sektor pariwisata yang menjadi andalan dari Provinsi Bali baik di setiap kabupaten/kota mengalami penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada sektor pekerjaan dan tingkat pengangguran saat tersebut. Tahun 2022, persentase tingkat pengangguran di Kota Denpasar akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Persentase Pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten	Persentase Pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Jembrana	4,52	4,11	3,94
Tabanan	4,21	3,94	3,83
Badung	6,92	6,93	6,87
Gianyar	7,53	6,90	6,78
Klungkung	5,42	5,35	1,96
Bangli	1,86	1,80	0,76
Karangasem	2,42	2,32	3,09
Buleleng	5,19	5,38	5,20
Kota Denpasar	7,62	7,02	5,08
Provinsi Bali	5,63	5,37	4,80

Sumber : BPS Bali, 2022

Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Mengurangi Pengangguran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN							
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03	5,08	100,315	6,62	100,232
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					99,990		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja mengurangi pengangguran Tahun 2022 terealisasi sebesar 99,99 (Baik). Target pada tahun 2022 menjadi 5,03 dari target 7,42 dikarenakan dalam jangka waktu tertentu perekonomian di Pemerintah Kota Denpasar pulih secara bertahap dan membaik pasca pandemi covid-19. Mengingat Angka Pengangguran di Kota Denpasar mengalami penurunan dari 7,02 pada tahun 2021 menjadi 5,08 persen pada Tahun 2022. Angka pengangguran Kota Denpasar Tahun 2022 masih diatas dari Provinsi Bali.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15

tahun keatas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

TPAK Denpasar selama kurun waktu tiga tahun mengalami fluktuatif, memasuki Tahun 2020, TPAK Denpasar yakni 70,91% kemudian tahun 2021 menjadi 68,67% dan Tahun 2022 yakni 72,37%. Dari TPAK kita dapat mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja bahwa pada tahun 2022 TPAK Kota Denpasar Meningkat, sehingga angka angkatan kerja meningkat dan pengangguran semakin menurun. Namun untuk melihat seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia dapat dilihat melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dari Tahun 2018-2020 angka pengangguran terbuka Kota Denpasar mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 yaitu 1,87% menjadi 7,62% pada Tahun 2020. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan oleh pandemic Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pengangguran.

TPT Kota Denpasar Tahun 2021 mengalami penurunan yakni 7,02% dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 5,08%. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian di Kota Denpasar berangsur-angsur pulih sehingga pengangguran semakin menurun.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mengurangi pengangguran adalah :

1. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.
2. Memanfaatkan aplikasi BKOL (Bursa Kerja Online) sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja.
3. Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan kordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan

layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I. Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi.

5. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
6. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf Academy) yang diperuntukan bagi masyarakat yang bertujuan memberi ruang kreatif pada seluruh insan kreatif, untuk menyalurkan ide dan gagasannya di bidang digitalisasi pada industri kreatif. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa menambahkan kompetensi bagi masyarakat baik yang ingin merintis usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki.

12) Sasaran Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan Teknologi dalam Pemerintahan sangat massif dikarenakan oleh perkembangan zaman dan era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya.

Pemerintah Kota Denpasar tentu tidak ketinggalan untuk turut serta

dalam menerapkan SPBE di lingkungan Pemenrintah Daerah. Hasil Indeks SPBE Kota Denpasar bisa dilihat dari table berikut :

Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI							
13	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,68	105,142	3,9	94,358
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					105,142		

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran optimalnya pemanfaatan Teknologi adalah 105,142 (Baik Sekali). Indeks SPBE Kota Denpasar Tahun 2022 adalah 3,68 yang ditargetkan 3,5. Tahun 2021 Indeks SPBE Kota Denpasar sebesar 3,19 dengan predikat Baik meningkat menjadi 3,68 (Sangat Baik) pada Tahun 2022. Indeks SPBE Kota Denpasar menjadi tertinggi di daerah Provinsi Bali.

Pemerintah Kota Denpasar, telah masih untuk menerapkan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, namun pada intinya perkembangan kondisi penerapan SPBE saat ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penerapan SPBE antara lain :

1. Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki acuan Peta Rencana SPBE yang menjadi referensi bagi tata kelola SPBE sehingga penerapan SPBE belum terpadu.
2. Secara umum SPBE sudah diterapkan di Kota Denpasar akan tetapi pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik perlu dipercepat dan dioptimalkan, hal ini terbukti dari masih belum optimalnya penggunaan aplikasi umum berbagi pakai antar OPD walaupun sampai saat ini Kota Denpasar sudah menerapkan integrasi antar sistem dan berbagi data melalui Pusat Data Kota Denpasar akan tetapi perlu dipercepat dan diperluas.
3. Jangkauan infrastruktur TIK yang didalamnya juga termasuk infrastruktur SPBE ke seluruh wilayah Kota Denpasar dan ke semua lapisan masyarakat perlu dioptimalkan.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Peta Rencana SPBE sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan

SPBE untuk tahun 2021-2026 :

1. Peta Rencana Aplikasi
2. Peta Rencana Infrastruktur
 - Peta Rencana Infrastruktur Jaringan dan Keamanan
 - Peta Rencana Perangkat Komputer
3. Peta Rencana Tata Kelola dan Manajemen
4. Peta Rencana Program Peningkatan Kompetensi

Beberapa Inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar untuk mempercepat SPBE antara lain:

1. Adanya Portal Satu Data Kota Denpasar
2. Adanya Sistem Pemantauan Jaringan (SIPENJAR)
3. Mengefisiensikan dan mengurangi sewa cloud dan mengoptimalkan penggunaan Pusat Data Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo
4. Berkolaboratif dengan seluruh perangkat daerah sesuai indikator SPBE
5. Penerapan IDENTIK sebagai portal TTE
6. Mengoptimalkan pemanfaatan SP4N Lapor
7. Adanya Portal ASN Denpasar Integrated Virtual Office System (DIVOS)

Adapun penghargaan

1. Kota Denpasar sebagai *Inovasi Smart Branding* terbaik kategori Kota Tahun 2022.
2. Kota Denpasar sebagai Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada sector Pemerintah dan terbentuknya Denpasar-CSIRT dari Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2022.

13) Sasaran Meningkatnya Inovasi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH							
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif (60)	Inovatif (55,68)	92,8	Sangat Inovatif	92,8
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					92,8		

Dari tabel diatas menunjukkan capaian kinerja sasaran 92,8 (Baik) dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam Indeks Inovasi Daerah terdapat 2 satuan yang dinilai yaitu satuan pemerintah daerah (15,20%) yang terdiri 15 indikator dan satuan inovasi daerah yang terdiri dari 20 indikator dengan proporsi 44,40% serta indikator jumlah inovasi dengan proporsi 30,40%.

Dalam satuan pemerintah daerah terdapat beberapa indikator yang memperoleh nilai minimal yaitu :

1. Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan
2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)
3. Penurunan presentase tingkat kemiskinan

Ketiga indikator tersebut memperoleh parameter 1 (minimal) sehingga nilai satuan pemerintah daerah tidak dapat maksimal.

Sedikitnya inovasi yang dimiliki oleh perangkat daerah Kota Denpasar yang dapat memenuhi persyaratan umum dalam Indeks Inovasi Daerah 2022 terutama dalam tahun penerapan inovasi (diterapkan pada tahun 2020-2021). Perangkat Daerah Kota Denpasar memang memiliki banyak inovasi tetapi kebanyakan merupakan inovasi lama (diterapkan sebelum tahun 2020) sehingga tidak dapat dilaporkan dalam Indeks Inovasi Daerah 2022. Pada tahun 2022 Kota Denpasar hanya mampu mengirimkan 21 inovasi untuk diukur indeksinya.

Dokumen administrasi yang dimiliki inovasi yang bisa dilaporkan tidak mampu memenuhi seluruh indikator yang ada, contohnya banyak inovasi yang belum melaksanakan sharing knowledge/bimtek terkait inovasi yang dimiliki, serta masih banyak inovasi yang regulasinya hanya SK Kepala Perangkat Daerah dan belum berupa SK Kepala Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah sehingga inovasi-inovasi tersebut tidak mampu memperoleh nilai maksimal dalam Indeks Inovasi Daerah 2022

Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan kajian-kajian baik dengan Universitas di Denpasar untuk serta pembinaan kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang ada di Kota Denpasar.

Kota Denpasar mendapatkan predikat “Kota Inovatif” pada Kategori Kota dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Adapun solusi yang dilaksanakan adalah membuat lomba inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi perangkat daerah dalam membuat inovasi baru serta meningkatkan pengertian perangkat daerah mengenai mekanisme inovasi daerah serta dokumen administrasi yang harus dimiliki oleh suatu inovasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Melaksanakan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2022 (KIPRAH Denpasar), yang serimonial penghargaannya dilaksanakan pada 14 Desember 2022 bertempat di Gedung Wanita Shanti Graha, kegiatan ini untuk memotivasi perangkat daerah untuk terus membuat inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Melaksanakan sosialisasi mekanisme inovasi daerah pada 17 November 2022 yang dilaksanakan secara daring.
3. Menerbitkan surat edaran nomor: 078/58/Litbang tanggal 09 Januari 2023 yang berisi:
 - agar membentuk tim inovasi pada masing masing perangkat daerah

- agar menyampaikan rancangan/proposal inisiatif
- serta mendata inovasi yang telah terimplementasi dan dilaksanakan di perangkat daerah tersebut.

Tujuan 5. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana

Tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah di Kota Denpasar pada Tahun 2022 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

14) Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang baik dan andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan, kondisi jalan yang baik di lingkungan Kota Denpasar, adanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi, drainase yang berfungsi normal, sistem sanitasi yang lancar dan terakses pada pengolahan limbah, rumah tangga yang mendapatkan akses air minum serta irigasi yang berfungsi normal.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dapat dilihat pada Tabel di bawah

Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR							
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58	58,92	99,892	64,86	90,841
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					99,892		

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian kualitas infrastruktur Denpasar 58,92% masih dibawah target dari 59,58%. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur adalah 99,892% (Baik).

Belum tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan kondisi jalan lingkungan di Kota Denpasar yang masih perlu penanganan lebih intensif di seluruh wilayah Kota Denpasar. Kualitas jalan lingkungan yang baik dan mantap sangat diperlukan, mengingat Kota Denpasar menjadi Ibu Kota Provinsi Bali dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi serta mobilitas masyarakat ke Kota Denpasar tinggi. Masalah kemantapan jalan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar. Secara bertahap prosentase kemantapan jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kualitas infrastruktur yakni dalam menjalankan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan, terbatasnya anggaran, kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder, kurangnya ketersediaan data base infrastruktur serta kemampuan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja PD merupakan tantangan permasalahan internal yang harus disikapi agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang infrastruktur.

Dari sisi realisasi persentase Jalan Lingkungan Kondisi baik tidak memenuhi target, karena perhitungan Jalan Lingkungan Tahun 2022 berdasarkan Database Jalan Lingkungan dan perhitungan panjang dari ruas ruas jalan yang sudah dikerjakan Dinas PUPR Kota Denpasar.

Dari sisi pelayanan angkutan umum masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum lainnya selain trans metro dewata seperti kondisi kendaraan yang memiliki batas umur yang melewati 25 tahun sehingga tidak layak untuk dipergunakan, jaringan trayek masih terputus atau tidak terkoneksi disemua wilayah , menyebabkan masyarakat harus menggunakan kendaraan lain agar sampai di tujuan. Rendahnya kualitas pelayanan itu membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi sangatlah tinggi, dari Permasalahan tersebut diatas menuntut keberpihakan Pemerintah Kota Denpasar sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum kedepannya, baik itu dengan TMD atau pun angkutan umum yang ada sekarang. salah satu yang telah dilakukan dengan mengadakan program layanan bus sekolah di Kota Denpasar yg menyasar siswa sekolah demi mengurangi kemacetan di Kota

Denpasar dan pengembangan layanan bus Trans Metro Dewata beserta angkutan pengumpanya.

Solusi dan Upaya yang dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian kualitas infrastruktur yakni meningkatkan kinerja pemerintahan dengan cara percepatan proses komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur, mengoptimalkan SDM yang ada dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas yang dikerjakan, meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

Sistem transportasi yang berkelanjutan merupakan gerakan yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan kota, konsep ini diterjemahkan sebagai upaya peningkatan fasilitas bagi komunitas bersepeda, pejalan kaki, fasilitas komunikasi, maupun penyediaan transportasi umum massal yang murah dan ramah lingkungan seperti kereta api listrik maupun angkutan umum lainnya yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya di kawasan Central Business District (CBD). Disamping itu, konsep transportasi berkelanjutan juga mendorong upaya teknologi komunikasi dan informasi untuk mengurangi kebutuhan pergerakan orang dan barang melalui penerapan konsep teleconference, tele-working, tele-shopping, tele-commuting, maupun pengembangan kawasan terpadu di perkotaan yang dapat mengurangi kebutuhan mobilitas penduduk antar kawasan seperti Transit Oriented Development (TOD).

Selain itu juga dinas perhubungan juga melaksanakan MOU KEMENHUB DITJEN HUBDAT dengan Pemprov, Prusda tentang TMD yaitu dengan melaksanakan penambahan sarana dan prasarana pelayanan Perhubungan dimana dilaksanakan dengan penambahan koridor baru serta kajian trayek operasi dari Trans Metro Dewata (TMD) yang beroperasi di Kota Denpasar serta melakukan sosialisasi serta promosi secara langsung maupun tidak langsung guna memberikan informasi tentang pelayanan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar serta meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum. Selain itu juga Dinas Perhubungan melakukan peremajaan ataupun penataan wajah Terminal penumpang demi memberikan rasa atau nuansa baru sehingga menggugah rasa atau minat setidaknya untuk masuk serta menggunakan kendaraan khusus angkutan umum. Selain itu terdapat pula angkutan khusus yaitu Bus Sekolah sebagai angkutan untuk Siswa Sekolah dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran dimana dalam hal ini baru melayani 2 (dua) kecamatan (Dentim dan Denut), dimana kedepannya ditingkatkan kearah yang lebih luas mencakup 2 (dua) kecamatan (Densel dan Denbar) demi meningkatkan minat masyarakat ataupun sekolah dalam menggunakan angkutan ini dimana untuk tahun sekarang jumlah penumpang mencapai 111.845 penumpang selain digunakan untuk angkutan ke sekolah bus ini juga digunakan untuk kegiatan yang diluar sekolah (Auting) hal ini dilakkukan pada saat liburan sekolah sehingga dapat meningkatkan Load Faktor (faktor muat).

Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan telah melakukan pemetaan data demi menunjang terlaksananya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perhubungan demi meningkatkan kualitas serta Kuantitas daripada Sarpras penunjang keselamatan Transportasi khususnya di Kota Denpasar dimana Sarpras ini merupakan piranti atau alat dalam melakukan pengaturan kendaraan yang melintas dijalan sehingga tercipta keamanan kelancaran serta keselamatan dalam berlalu lintas.

15) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tata cara perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus sebagai berikut.

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Keterangan:

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL di Kota Denpasar Tahun 2022 diperoleh hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 49,71) + (0,405 \times 83,89) + (0,219 \times 27,59) \\ &= 18,69 + 33,98 + 6,04 = 58,71 \end{aligned}$$

Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,91	58,71	94,831	62,13	94,495
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					94,831		

Perhitungan nilai IKLH Tahun 2022 menggunakan aplikasi dari KLHK RI, yaitu melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Dalam perhitungan nilai IKA pada aplikasi tersebut, penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level kabupaten/kota proses inputnya dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar, sedangkan penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level pusat diinput langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Dalam perhitungan nilai IKU dan IKL pada aplikasi, penginputan data dilakukan langsung oleh KLHK, dengan memasukkan nilai hasil pengujian udara ambien dengan metode passive sampler dan hasil pengukuran alat Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk perhitungan IKU dan data RTH yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk perhitungan IKL. Berdasarkan data yang telah diinput pada aplikasi, maka diperoleh hasil perhitungan Kota Denpasar untuk tahun 2022 sebesar 49,71 untuk IKA; 83,89 untuk IKU; dan 27,59 untuk IKL, sehingga total nilai IKLH diperoleh sebesar **58,71** dan termasuk dalam kriteria sedang. Nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2022 tersebut diketahui mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2021 yang mencapai 59,47 dengan kriteria sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH nasional tahun 2022 sebesar 72,42 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar

70,89 maka nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 58,71 masih berada di bawah capaian nilai IKLH nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar demi terselenggaranya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Adapun penjabaran mengenai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, pH, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coliform. Untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi KLHK RI yaitu dengan menginput data hasil uji kualitas air di Kota Denpasar Tahun 2022 pada website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Adapun pengujian kualitas air sungai tahun 2022 yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikerjasamakan dengan pihak ketiga (PT. Unilab Perdana). Data hasil uji kualitas air yang diinput dalam sistem merupakan hasil pengujian terhadap 30 (tiga puluh) titik lokasi pada 10 (sepuluh sungai/tukad) untuk dua kali periode pengambilan, yaitu pada bulan Maret dan Juli Tahun 2022. Selain menggunakan data hasil uji kualitas air sungai di Kota Denpasar Tahun 2022 pada 30 (tiga puluh) titik lokasi tersebut, perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2022 juga menggunakan data hasil uji kualitas air sungai pada 3 (tiga) titik lokasi di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh KLHK RI dengan tiga kali pengambilan contoh uji masing-masing pada bulan Mei, Juli, dan Oktober 2022 sehingga jumlah titik sampel untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2022 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) titik sampel. Adapun lokasi dan titik sampel air sungai di Kota Denpasar Tahun 2022 disajikan pada Tabel 1

Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Nama Sungai	Segmen	Lokasi
1.	Tukad Badung	Hulu	Dam Mertegangga (Desa Ubung Kaja)
		Tengah	Jalan Pulau Biak Denpasar
		Hilir	Estuari Dam, Pemogan (dekat Pura Tanah Kilap)
2.	Tukad Ayung	Hulu	Jl. Dam Peruapan, Peguyangan Kaja (Belakang SMAN 8 Dps)
		Tengah	Jl. Noja Saraswati, Oongan
		Hilir	Jembatan By Pass Kesiman Kertelangu (Dekat Restoran Hongkong Garden)
3.	Tukad Teba	Hulu	Jl. Gatsu Barat Kel. Ubung (Belakang Hotel Astom)
		Tengah	Jl. Batukaru (Br. Monang Maning Ds. Tegai Kerta)
		Hilir	Imam Bonjol (Ds. Pemecutan Kelod)
4.	Tukad Mati	Hulu	Jl. Kebo Iwa, Padang Sambian Kaja
		Tengah	Br. Monang maning Ds. Tegai Harum (Jl. Mahendradatta)
		Hilir	Br. Umadui Ds. Padangsambian Kelod
5.	Tukad Loloan	Hulu	Jl. Hangtuah, Sanur (Timur Bundaran Renon)
		Tengah	Jl. Penyaringan, Samur
		Hilir	Jl. Tanjung, Samur
6.	Tukad Rangda	Hulu	Jl. Tukad Irawadi, Kelurahan Panjer
		Tengah	Jl. Tukad Badung XX, Gang I (DAM)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (dekat jembatan)
7.	Tukad Punggawa	Hulu	Jl. Ir. H. Juanda, Renon (dekat Bajra Sandhi)
		Tengah	Jl. Tukad Yeh Aya, Kel. Renon (dekat Moena Fresh)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (depan tilestari)
8.	Tukad Ngenjung	Hulu	Jl. Tukad Balian Gg. IX
		Tengah	Jl. Tukad Balian (depan Gg. Nanggala)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (depan Para)
9.	Tukad Bindu	Hulu	Jl. Gatsu Timur Kel. Tonja
		Tengah	Jl. Surabi
		Hilir	Jl. Sedap Malam
10.	Tukad Guming	Hulu	Jl. Antasara Gg. Dewi Madri
		Tengah	Jl. Seroja Gg. Belimbing
		Hilir	Jl. Kecubung I (dekat kantor Dinas SatPol PP)

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi KLHK RI, diperoleh total nilai indeks kualitas air Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 49,71. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$. Berdasarkan kondisi demikian perlu dilakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menggalakkan upaya pengendalian pencemaran air, salah satunya melalui Program Kali Bersih (Prokasih) dengan tidak membuang sampah serta limbah hasil industri maupun rumah tangga yang tidak diolah ke sungai.

Indeks Kualitas Air di Kota Denpasar juga dipengaruhi oleh Kabupaten lain di Hulu sungai, mengingat Kota Denpasar terletak di Dataran Rendah dan merupakan daerah Hilir yang bermuara ke Pantai. Indeks Kualitas Air yang masih kurang tersebut, harus segera dilakukan perbaikan seperti pelaksanaan program kali bersih, penindakan bagi pabrik yang belum mempunyai pengolahan limbah yang baik dan bersinergi dengan Kabupaten lain terkait tentang kualitas air di Hulu dan Hilir sungai.

Kondisi Air Sungai Kota Denpasar Tahun 2022

No	Kategori	Jumlah	Presentase Pemenuhan (%)	Bobot	Indeks Kualitas Air (IKA)
1	Memenuhi	5	7,25%	70	5,07
2	Tercemar Ringan	58	84,06%	50	42,03
3	Tercemar Sedang	6	8,69%	30	2,61
4	Tercemar Berat	0	0%	10	0
Jumlah					49,71

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>, 2022

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pengukuran indeks kualitas udara menggunakan data dari pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode passive sampler dan hasil pengukuran alat Air Quality Monitoring System (AQMS) yang merupakan bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang ditempatkan di Taman Lumintang, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara. Untuk pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode passive sampler, pengukuran dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lokasi pemantauan di Kota Denpasar adalah area transportasi (Jalan Gajah Mada), area industri (Jalan Hang Tuah), area perumahan (Jalan Gunung Galunggung), serta area perkantoran/perdagangan (Jalan Majapahit). Lokasi pemasangan alat passive sampler telah ditentukan serta alat dan bahan dikirimkan langsung ke lokasi dan diuji langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adapun pemasangan passive sampler dilaksanakan sebanyak dua periode, periode pertama dilaksanakan pada tanggal 14-28 April 2022, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada tanggal 1-15 Juli 2022. Data titik lokasi sampel disajikan pada Tabel 3, sedangkan Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4

Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara

No	Nama Jalan	Lokasi Sampel	Metode Pemantauan	Koordinat	
				Lattitude	Longitude
1	Jl. Gajah Mada	Transportasi	Manual Passive	8° 39' 19.9584"	115°12'45.7416
2	Jl. Hang Tuah Sanur	Industri/ Agro Industri	Manual Passive	8°40'28.5672"	115°15'35.4636
3	Jl. Gunung Galunggung	Pemukiman	Manual Passive	8°37' 14.0844"	115°11'15.5652"
4	Jl. Majapahit, No.6	Perkantoran/ Komersial	Manual Passive	8°38'13.4988"	115°12'40.0077"
5	Taman Lumintang	-	Otomatis (AQMS)	-8,6355	115,212279

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2022

Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2022

Parameter	Hasil pemantauan	Baku mutu	Indeks Dibagi Baku Mutu
NO ₂	14,49	40	0,36
SO ₂	8,35	20	0,42
Rataan Indeks			0,39
Indeks Kualitas Udara			83,89

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2022

Indeks Kualitas Lahan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas lahan adalah indeks kualitas lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini yaitu: $IKTL = 100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times 50 / 54,3)$ Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 27,59. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 27,59. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan masing-masing indikator sasaran yaitu sebagai berikut

1. Pada sasaran meningkatnya kualitas air yaitu masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai, kinerja IPAL yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif, sulitnya pelaku usaha kecil dan menengah membangun IPAL, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai.
2. Pada sasaran meningkatnya kualitas udara yaitu adanya kemacetan di beberapa ruas jalan, masih adanya masyarakat yang membakar sampah,

dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

3. Pada sasaran meningkatnya kualitas lahan yaitu adanya alih fungsi lahan, kurangnya peremajaan, terbatasnya tenaga dan sarana perawatan pohon perindang, dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan pohon.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan masing-masing indikator sasaran yaitu sebagai berikut.

1. Pada sasaran meningkatnya kualitas air yaitu menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air, menambah jumlah SDM pengendalian pencemaran air serta melakukan pelatihan, meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, adanya komitmen dari desa/kelurahan, OPD terkait serta usaha dan/atau kegiatan untuk bersama-sama menjaga sungai.
2. Pada sasaran meningkatnya kualitas udara yaitu meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas udara ambien, memperbanyak ruang terbuka hijau, dan menggalakkan kembali program Emisi Bersih.
3. Pada sasaran meningkatnya kualitas lahan yaitu melakukan peningkatan kapasitas SDM, melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH, melakukan penanaman pohon, pengembangan taman kehati dan kampung hijau.

Inovasi

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan untuk mewujudkan upaya pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar, yaitu melalui penetapan pusat pendidikan lingkungan hidup di Dam Peraupan dengan nama "SERULING (Sama-sama Melestarikan Lingkungan) di Dam Peraupan". Dengan adanya pusat pendidikan lingkungan hidup ini diharapkan akan memacu masyarakat untuk sadar mau dan mampu melestarikan lingkungan hidup dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pelestarian sumber daya air sebagai upaya mitigasi serta pengendalian pencemaran air dengan konsep pemberdayaan masyarakat.



Kegiatan penanaman pohon, dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022 di Dam Peraupan, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar utara



Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2022, dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta

Penghargaan

Tahun 2022 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak dua sekolah yaitu SDN 7 Dauh Puri dan SMP PGRI 2 Denpasar, demikian juga untuk sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional sebanyak dua sekolah yaitu SDN 29 Pemecutan dan SDN 3 Sesetan. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Alue Dohong Ph.D. Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitar dan daerah.

16) Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Pada tingkat nasional, penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO, yaitu Culture for Development Indicators (CDIS). Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan, dilaksanakan pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Dalam hal ini, IPK bukan mengukur nilai budaya tetapi lebih memotret capaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Berkenaan dengan penghitungan Indeks Kebudayaan Kota Denpasar, pada saat ini terdapat 3 (tiga) model penghitungan, yaitu penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional (Handbook IPK, 2018), penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bali dan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar.

Penyusunan IPK Kota Denpasar perlu dilakukan untuk mengukur pembangunan kebudayaan yang berlangsung di Kota Denpasar. Tidak tersedianya data yang sama seperti yang dipergunakan untuk menyusun IPK Nasional menjadi kendala utama dalam penyusunan IPK Kota Denpasar, sesuai dengan pedoman dan arahan penyusunan IPK Nasional. Penyusunan IPK secara nasional dilakukan pada tahun 2018 adalah dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang sebagian besar berasal dari Susenas MSBP dan Susenas KOR 2018 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga.

Pada saat ini, data yang sesuai dengan pedoman penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut, tidak tersedia di Kota Denpasar. Untuk dapat menyusun IPK Kota Denpasar, maka dibuat pengukuran dengan data yang tersedia, dengan tetap mengacu dari IPK nasional dan indikator penjabaran misi RPJMD Provinsi Bali. Dari tiga model tersebut, atas dasar pertimbangan sifatnya yang temporer serta ketersediaan data, maka metode yang paling mungkin untuk dipilih (feasible) adalah yang ketiga atau Penyusunan IPK Kota Denpasar berbasis data yang tersedia. Oleh sebab itu,

apapun hasilnya pada saat ini, masih akan dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan ketersediaan data yang ada.

Sangat disadari, karena IPK ini disusun berdasar data yang tersedia tentang kondisi spesifik Kota Denpasar, maka IPK ini tidak dapat diperbandingkan/disamakan dengan IPK daerah lain. Namun demikian, IPK yang Penghitungan IPK Kota Denpasar 15 disusun ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di bidang kebudayaan Kota Denpasar, antar waktu, selama indikator yang dipergunakan datanya tersedia secara continuous atau time series.

Model Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar diadopsi dari UNESCO Culture for Development Indicators (CDIS) dengan menempatkan 'kebudayaan' sebagai salah satu indikator untuk mendukung pencapaian misi 5 RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Meskipun IPK Kota Denpasar yang disusun hanya berlaku bagi Kota Denpasar, namun tetap mengacu pada IPK Nasional.

Sesuai dengan pedoman yang ada dalam perhitungan IPK Nasional, metode yang digunakan dalam menghitung IPK Kota Denpasar, terdiri dari 5 (lima) tahap:

1. Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK

Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan indikator yang dinilai relevan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan di Kota Denpasar. Indikator yang dipilih berdasarkan ketersediaan data dan yang dijadikan sebagai alat ukur oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Dalam penyusun IPK Kota Denpasar tidak digunakan indikator yang sama dengan indikator IPK Nasional yang menggunakan berbagai sumber informasi yang sebagian besar berasal dari Susenas MSBP dan Susenas KOR 2018 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga dan dilakukan pengumpulan datanya melalui survei. Dalam penyusunan IPK Kota Denpasar, karena keterbatasan waktu dan biaya saat pengumpulan Penghitungan IPK Kota Denpasar 16 data, tidak dilakukan melalui survei rumah tangga. Untuk itu, digunakan data yang tersedia pada perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan 7 (tujuh) dimensi kebudayaan.

2. Proses Seleksi Indikator

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator mana saja yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks. Pemetaan dan proses seleksi indikator terhadap penyusunan IPK dilakukan dengan mengkaji ulang semua indikator yang dikumpulkan, selanjutnya dipilih indikator yang sesuai dengan 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Data-data ini kemudian diseleksi untuk dilihat keterkaitannya dengan 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional. Pertimbangan dalam proses seleksi ini dilakukan melalui proses diskusi oleh para ahli atau expert judgment, yaitu suatu penilaian berdasarkan seperangkat kriteria dan/atau keahlian tertentu yang telah diperoleh dalam suatu disiplin atau bidang pengetahuan tertentu.

3. Indikator Hasil Seleksi

Melalui proses seleksi terhadap data-data yang ada, diperoleh sejumlah data yang mencerminkan indikator dari 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional. Dalam proses ini diperoleh 23 (dua puluh tiga) indikator terpilih. Indikator terpilih ini akan digunakan untuk menentukan skor masing-masing dimensi IPK.

4. Normalisasi Indikator

Setelah melalui proses seleksi dan diperoleh 23 (dua puluh tiga) indikator terpilih, data-data ini masih bervariasi satuannya sehingga perlu Penghitungan IPK Kota Denpasar 17 dilakukan proses pengolahan lebih lanjut, yaitu normalisasi data. Tujuan normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama sebagai standarisasi. Pada tahap pertama dilakukan validasi data terlebih dahulu, kemudian dilakukan penghitungan rata-rata. Normalisasi data dilakukan melalui pemberian skor, dengan tujuan untuk menyamakan ukuran data. Dengan memperbandingkan data dengan rata-ratanya maka dapat dibuat skor secara gradual sebagai berikut: - skor 1 jika lebih kecil dari rata-rata; - skor 3 jika besarnya sama dengan rata-rata; - skor 5 jika lebih besar dari rata-rata. (nilai skor ini berlaku untuk indikator yang baik/positif; untuk indikator yang negatif seperti konflik sosial, maka skor ini berlaku sebaliknya).

5. Penentuan Bobot Tiap Dimensi

Penentuan bobot bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan secara relatif terhadap dimensi lain. Pertimbangan dalam proses penentuan bobot ini dilakukan melalui proses diskusi oleh para ahli atau expert judgment, yaitu suatu penilaian berdasarkan seperangkat kriteria dan/atau keahlian tertentu yang telah diperoleh dalam suatu disiplin atau bidang pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, kesepakatan di antara para ahli tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. Penilaian para pakar adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan tinjauan secara cepat berdasarkan pengetahuan para pakar terkait suatu aspek tertentu dalam mengukur indeks.

Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66,97	63,85	95,341	74,84	85,315
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					95,841		

Penghitungan IPK Kota Denpasar dilakukan setelah dilakukan penilaian terhadap setiap indikator pembentuk IPK.

- Membuat nilai rata-rata capaian time series selama 5 tahun (2016-2020) atau sesuai data yang tersedia, dirata-rata dan dianggap sama dengan rata-rata 5 tahun.
- Hasil pemberian skor masing-masing indikator setiap tahun kemudian dijumlah. Jumlah skor indikator pada tahun 2018 digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan skor IPK Kota Denpasar.
- Oleh karena IPK Nasional untuk Provinsi Bali yang tersedia adalah IPK tahun 2018, maka IPK ini digunakan sebagai angka acuan/dasar perhitungan. Kemudian untuk konversi target yang direncanakan menggunakan formula sebagai berikut:

$$IPK \text{ Kota Denpasar} = \frac{\text{Total skor target Kota Denpasar tahun } t}{\text{Total skor Kota Denpasar tahun 2018}^*) \times IPK \text{ Bali tahun 2018}$$

^{*)} Total skor Kota Denpasar tahun 2018 = IPK Denpasar 2018 = IPK Bali 2018

Berdasarkan hasil pendataan ulang pada tahun 2022, terdapat banyak indikator IPK Kota Denpasar yang mengalami penyesuaian, termasuk updating data dari dinas terkait. Hasil perhitungan IPK Kota Denpasar pada saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan menggunakan data yang tersedia saat itu sebagai berikut:

- IPK Kota Denpasar tahun 2018 berdasarkan hasil konversi skor indikator tahun 2018 adalah sama dengan IPK Provinsi Bali = 65,39, sementara IPK Kota Denpasar tahun 2019 dan 2020 masing-masing 63,85 dan 54,62.

IPK	Realisasi <i>(berdasarkan data saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026)</i>		
	2018	2019	2020
IPK Kota Denpasar (waktu penyusunan RPJMD)	65,39	63,85	54,62

Terjadi penurunan IPK tahun 2020 dan 2021 disebabkan beberapa indikator menurun capaiannya akibat pandemi covid-19, seperti pembatasan pertunjukan seni budaya serta beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

- Target IPK Kota Denpasar yang tercantum dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 berdasarkan data yang tersedia saat itu dan hasil penghitungan IPK tahun 2022-2026 sebagai berikut:

IPK	Target <i>(berdasarkan data saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026)</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
IPK Kota Denpasar (waktu penyusunan RPJMD)	66,97	68,54	68,54	74,84	74,84

Sementara itu, berdasarkan updating data indikator IPK Kota Denpasar yang dilakukan pada tahun 2022, terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan data serta satuan indikator. Hal ini dikarenakan perangkat daerah mengalami kesulitan dalam mengukur serta mengumpulkan data tersebut, sehingga perlu direkap ulang dan dilakukan

penghitungan kembali. Berikut hasil penghitungan IPK Kota Denpasar berdasarkan updating data tahun 2022:

- Berdasarkan hasil penghitungan IPK Kota Denpasar dengan menggunakan data yang sudah dilakukan pemutakhiran pada tahun 2022, menunjukkan IPK Kota Denpasar tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami perbedaan dengan hasil hitungan IPK saat penyusunan dokumen RPJMD.

IPK	Realisasi <i>(berdasarkan pemutakhiran data tahun 2022)</i>				
	2018	2019	2020	2021	2022
IPK Kota Denpasar (hasil pemutakhiran data)	65,39	68,47	50,00	60,77	63,85

- Skor IPK Kota Denpasar pada tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini terlihat dari data indikator pada dimensi ekspresi budaya yaitu Jumlah Pelaku Seni yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kesenian Tradisional dan indikator pada dimensi ketahanan sosial budaya, yaitu Jumlah Kejadian Konflik Sosial yang mengalami kenaikan kejadian.
- Jika dilihat dari target IPK Kota Denpasar tahun 2022, hasil hitungan saat penyusunan RPJMD Kota Denpasar menunjukkan angka **66,97**, sementara berdasarkan hasil realisasi kinerja tahun 2022 menunjukkan angka **63,85**. Belum tercapainya target ini juga dipengaruhi oleh adanya pemutakhiran data sehingga berpengaruh pada penilaian atau skoring pada beberapa indikator.

Faktor yang mempengaruhi Penyusunan IPK Kota Denpasar

Optimalisasi upaya pelestarian kebudayaan (pelindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) dapat dilaksanakan dengan memetakan potensi masalah serta mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran IPK Kota Denpasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut antara lain adalah:

- Indikator IPK Kota Denpasar tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026, untuk mewujudkan misi kelima, sehingga harus dilaksanakan;
- Kejadian luar biasa pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke sistem online (daring);

- Adanya kebijakan dalam hal prioritas pendanaan saat pandemi, sehingga penyelenggaraan festival, lomba seni-tradisi dan fasilitasi seni budaya yaitu tetap dilaksanakan (luring) dengan menerapkan protokol kesehatan maupun secara daring, untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat. Selain itu juga terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat;
- Tahun 2022 sudah mulai kembali aktivitas masyarakat seiring pemulihan pasca covid-19;
- Selain faktor di atas, dalam hal ketersediaan data dukung IPK Kota Denpasar, belum seluruh potensi budaya yang ada terdata dengan rapi secara kontinu agar lebih valid. Saat ini, data pendukung IPK Kota Denpasar dianggap kurang penting sehingga data yang tersedia tidak berkelanjutan (continuous);
- Perlu ada ada pendataan ulang untuk indikator yang belum tersedia lengkap datanya sehingga menjadi lebih valid

Rekomendasi ke depan mengenai penyusunan indeks kebudayaan ini ada beberapa pilihan/alternatif:

- 1) Tetap seperti sekarang, dengan cara melanjutkan metode yang dilakukan saat ini dan pemutakhiran data secara rutin; atau
- 2) Mempertajam penghitungan IPK dengan perubahan, dalam hal ini akan menjadi kuat alasannya sejalan dengan beberapa momentum perubahan ke depan pada tahun 2025 sebagai waktu integrasi sistem pemerintahan dan perencanaan yang terpadu (Pilkada/pelantikan kepala daerah serentak, tahun mulai yang sama untuk RPJP, RPJM, RKP dan turunannya). Adapun perubahan yang dilakukan dengan cara:
 - Mengikuti dan menyesuaikan dengan variabel nasional, dengan melakukan penambahan kegiatan pendataan yang memadai, atau
 - Memperkuat dimensi lokal dengan merumuskan variabel pengukuran yang diturunkan dari Peraturan Daerah secara lokal dan penambahan kegiatan pendataan secara memadai.

Solusi yang dilakukan agar IPK Kota Denpasar mencapai target dan meningkat adalah sebagai berikut:

1. Merancang kegiatan festival seni dan budaya yang juga dapat menjadi sarana promosi budaya.

2. Melakukan inventarisasi dan penetapan cagar budaya sebagai sarana pelestarian Cagar Budaya
3. Melakukan kegiatan yang melibatkan Lembaga Adat yaitu Desa Adat dan Subak
4. Melakukan kegiatan yang melibatkan Sanggar/Sekaa/Komunitas Seni dan pelaku seni sebagai upaya Pengembangan Kesenian Tradisional
5. Aktif menggunakan berbagai media yang dimiliki sebagai sarana yang dapat diakses sebagai sumber data dan informasi sejarah

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan pagu sebesar Rp 770.514.882.350,00 dan realisasi belanja atas pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 637.462.472.687,73 dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	262.617.693.915,00	220.968.514.632,46	84,140
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	257.683.317.060,00	224.119.148.026,18	86,974
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat	6.452.800.437,00	6.349.743.128,00	98,402
4	Mengurangi Kemiskinan	3.933.924.270,00	3.478.177.978,51	88,414

5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA	651.192.318,00	512.591.184,00	78,715
6	Menurunnya kasus kriminalitas	812.321.845,00	809.685.067,00	99,675
7	Meningkatkan ketahanan pangan	3.603.714.370,00	3.377.536.493,00	93,723
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	2.370.455.428,00	1.271.833.287,00	53,653
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	701.256.290,00	660.132.382,00	94,135
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	11.851.843.734,00	10.395.695.847,00	87,713
11	Mengurangi Pengangguran	6.349.489.694,00	6.244.450.812,00	98,345
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	3.720.568.340,00	3.553.411.995,00	95,507
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	96.000.000,00	45.198.000,00	47,081
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	105.333.038.445,00	90.338.606.542,58	85,764
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	72.140.978.884,00	34.540.791.708,00	47,879
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	32.196.287.320,00	30.796.955.605,00	95,653
	TOTAL	770.514.882.350,00	637.462.472.687,73	82,732

Sumber : BAPPEDA Kota Denpasar 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.26 diatas dapat diketahui persentase realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 82,73 % meningkat sebesar 2,76% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2021 yang sebesar 79,97%. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada Tahun 2022 sebagaimana Tabel 3.23

Tabel 3.23 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
MISI 1					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	100,258	220.968.514.632,46	84,140
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	100,053	224.119.148.026,18	86,974
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	87,007	6.349.743.128,00	98,402
4	Mengurangi Kemiskinan	1	99,585	3.478.177.978,51	88,414
MISI 2					
5	Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	1	100,337	512.591.184,00	78,715
6	Menurunnya Kasus Kriminalitas	1	100,150	809.685.067,00	99,675
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	98,308	3.377.536.493,00	93,723
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	1	99,974	1.271.833.287,00	53,653
MISI 3					
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,266	660.132.382,00	94,135
10	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	100,178	10.395.695.847,00	87,713
MISI 4					
11	Mengurangi Pengangguran	1	99,990	6.244.450.812,00	98,345
12	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	1	105,142	3.553.411.995,00	95,507
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	92,800	45.198.000,00	47,081
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	98,892	90.338.606.542,58	85,764

15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	94,831	34.540.791.708,00	47,879
MISI 5					
16	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	95,341	30.796.955.605,00	95,653

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2022 (Data diolah)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam Tabel 3.24 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 16 (enam belas) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% tidak ada. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.24 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	100,258	84,140
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	100,053	86,974
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	87,007	98,402
4	Mengurangi Kemiskinan	1	99,585	88,414
5	Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	1	100,337	78,715

6	Menurunnya Kasus Kriminalitas	1	100,150	99,675
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	98,308	93,723
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	1	99,974	53,653
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,266	94,135
10	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	100,178	87,713
11	Mengurangi Pengangguran	1	99,990	98,345
12	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	1	105,142	95,507
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	92,8	47,081
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	98,892	85,764
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	94,831	47,879
16	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	95,341	95,653

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.24, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran masih belum efisien.

1. Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan tercapainya capaian kinerja 100,258 persen dicapai dengan realisasi anggaran 84,14 persen.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan tercapainya capaian kinerja 100,053 persen dicapai dengan realisasi anggaran 86,974 persen.
3. Sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dengan tercapainya capaian kinerja 87,007 persen dicapai dengan realisasi anggaran 98,402 persen.
4. Sasaran memngurangi kemiskinan dengan tercapainya capaian kinerja 99,585 persen dicapai dengan realisasi anggaran 88,414 persen.

5. Sasaran meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA dengan tercapainya capaian kinerja 100,337 persen dicapai dengan realisasi anggaran 78,715 persen.
6. Sasaran menurunnya kasus kriminalitas dengan tercapainya capaian kinerja 100,150 persen dicapai dengan realisasi anggaran 99,675 persen.
7. Sasaran meningkatnya ketahanan pangan dengan tercapainya capaian kinerja 98,308 persen dicapai dengan realisasi anggaran 93,723 persen.
8. Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana dengan tercapainya capaian kinerja 99,974 persen dicapai dengan realisasi anggaran 53,653 persen.
9. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan tercapainya capaian kinerja 101,266 persen dicapai dengan realisasi anggaran 94,135 persen.
10. Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan tercapainya capaian kinerja 101,178 persen dicapai dengan realisasi anggaran 87,713 persen.
11. Sasaran mengurangi pengangguran dengan tercapainya capaian kinerja 99,99 persen dicapai dengan realisasi anggaran 98,345 persen.
12. Sasaran optimalnya pemanfaatan teknologi dengan tercapainya capaian kinerja 105,142 persen dicapai dengan realisasi anggaran 95,507 persen.
13. Sasaran meningkatnya inovasi daerah dengan tercapainya capaian kinerja 92,8 persen dicapai dengan realisasi anggaran 47,081 persen.
14. Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dengan tercapainya capaian kinerja 98,892 persen dicapai dengan realisasi anggaran 85,764 persen.
15. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan tercapainya capaian kinerja 94,831 persen dicapai dengan realisasi anggaran 47,879 persen.
16. Sasaran meningkatnya pembangunan kebudayaan dengan tercapainya capaian kinerja 95,341 persen dicapai dengan realisasi anggaran 95,653 persen.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022. LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil pengukuran pada 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, sebagai berikut :

- 7 indikator atau 41,18% kategori Baik Sekali dan melampaui target;
- 9 indikator atau 52,94% kategori Baik;
- 1 indikator atau 5,88% kategori Baik Sekali (Data masih menggunakan tahun 2021, dikarenakan belum rilis BPS);

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja Tahun Pertama yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2022 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Baik Sekali karena melampaui target, 9 (sembilan) Indikator Kategori Baik, 1 (satu) Indikator Kategori Baik Sekali namun masih memakai data tahun 2021 karena belum rilis dari BPS.

Terhadap target kinerja yang masih dalam kategori Baik, telah dilakukan analisis permasalahannya serta solusi perbaikannya sebagaimana tercantum pada analisis capaian masing-masing indikator kinerja.

Denpasar, 27 Maret 2023

Walikota Denpasar,



ICUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Denpasar, 9 Januari 2023
WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2023
1		2		3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan		Indeks	0.779
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup		Tahun	75.46
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita		Rupiah	2.422.121
4	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan		Persen	2.01
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA		Persen	89.34
6	Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)		Angka	105.63
7	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		Indeks	93.7
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana		Indeks	98.72
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM		Persen	88.16
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Predikat SAKIP	Predikat	A 80.01
		2	Opini BPK	Opini	WTP
11	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	4.18

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
1		2	3	4
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	Indeks	3.7
13	Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	60.47
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.95
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	68.54

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp 2.359.997.001.430 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)



WALIKOTA DENPASAR,

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

**PENGHARGAAN DIRAIH PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2022**

NO	BULAN	NAMA PENGHARGAAN	DARI	KETERANGAN
1	JANUARI	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021	Kementerian PANRB	Pemkot Denpasar meraih indeks tertinggi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 se-Provinsi Bali untuk kategori kabupaten/kota
2	JANUARI	Penghargaan Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Terbaik 2021	Ombudsman	Berhasil memberikan pelayanan terbaik.
3.	MARET	Penghargaan PDN (Pemutakhiran Data Mandiri)	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Pemkot Denpasar, berhasil mewujudkan ASN Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan update terkait Pemutakhiran Data Mandiri ASN ke dalam sistem aplikasi yang dimiliki BKN.
4.	APRIL	Desa Zero Waste	Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri	Desa Sanur Kauh dianggap telah mampu mengelola sampah yang dihasilkan di wilayah Desa Sanur Kauh.
5.	APRIL	Desa Zero Waste	Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri	Desa Kesiman Kerta Langu dianggap telah mampu mengelola sampah yang dihasilkan di wilayah Desa Sanur Kauh.
6.	MEI	Penghargaan Sertifikat Bebas Frambusia	Kemenkes RI	Kota Denpasar merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia dimana dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut terhitung tahun 2019 – 2021 tidak pernah adanya kasus Frambusia.
7.	MEI	Penghargaan WTP 10 Kali Berturut Dari BPK RI	BPK RI Perwakilan Bali	Pemkot Denpasar kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesepuluh kalinya.
8.	JUNI	Penghargaan Keuangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Pemkot Denpasar berhasil meningkatkan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi
9	JUNI	The Best 5 P4 (Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik) Tingkat Nasional.	Kementerian PANRB	Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan P4 yang akuntabel, cepat dan murah serta terintegrasi dengan portal nasional.

NO	BULAN	NAMA PENGHARGAAN	DARI	KETERANGAN
10	JUNI	Penghargaan Promosi Desa Wisata Nusantara Tingkat Nasional	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT)	Pemerintah Kota Denpasar berhasil melakukan promosi terhadap pelaksanaan desa wisata di Kota Denpasar.
11	JULI	Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Terbaik Nasional.	Kementerian Koperasi RI	Walikota Denpasar telah mampu sebagai penggerak koperasi yang ada di Kota Denpasar.
12.	JULI	Anugrah KPAI 2022	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Karena Pemerintah Kota Denpasar komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis aplikasi SIMEP Perlindungan Anak.
13.	JULI	Anugrah KPAI Organisasi Profesi Perlindungan Anak	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Karena Pemerintah Kota Denpasar mampu melibatkan seluruh stake older untuk terlibat dalam perlindungan anak termasuk APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia)
14.	JULI	Penghargaan UHC (Universal Health Coverage	BPJS Kesehatan	Pemerintah Kota Denpasar mampu melaksanakan UHC di seluruh Kota Denpasar mencapai 96 persen
15.	AGUSTUS	Penghargaan Kejar Award	OJK Pusat	Diberikan pada SDN 3 Sesetan Kota Denpasar karena telah mampu menggerakkan anak-anak sekolah untuk turut menangani permasalahan sampah melalui bank sampah sekolah.
16.	SEPTEMBER	Penghargaan "BKN" Award Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Pemkot Denpasar berhasil melaksanakan penerapan manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
17.	SEPTEMBER	Penghargaan "BKN" Award Implementasi Manajemen ASN Terbaik	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Pemkot Denpasar berhasil melaksanakan penerapan manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
18.	SEPTEMBER	Penghargaan Pasar Paling Aman dari Bahan Berbahaya	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI	Pasar Nyanggelan terpilih paling aman dari bahan berbahaya tingkat nasional setelah melakukan berbagai kajian survei.

NO	BULAN	NAMA PENGHARGAAN	DARI	KETERANGAN
19.	SEPTEMBER	Penghargaan WTP 10 Kali	Kementerian Keuangan RI	Pemkot Denpasar berhasil mempertahankan Opini WTP ke-10 kali. Capaian ini tak lepas dari komitmen Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa serta dukungan seluruh OPD dalam menjaga akuntabilitas, kinerja serta pelaporan.
20.	OKTOBER	Anugrah Kualitas JPT Katagori Baik	KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)	Pemerintah Kota Denpasar telah mampu mengisi jabatan tinggi dengan kualitas baik, dengan sesuai dengan merit sistem dan amanat UU No.5 Th. 2014 tentang ASN.
21.	DESEMBER	Penghargaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN dan RB RI	Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Reformasi Birokrasi dari predikat nilai B naik menjadi BB, dari pelaporan SAKIP dan RB.
22.	DESEMBER	Penghargaan Pelayanan Prima Capil	Kementerian PAN dan RB	Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar telah mampu memberikan pelayanan dengan berbagai inovasi digital yang telah di kembangkan.
23.	DESEMBER	Penghargaan Kepatuhan LHKPN	KPK RI	Pemerintah Kota Denpasar mampu berkomitmen meningkatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan kepatuhan melakukan pelaporan terhadap LHKPN.
24.	DESEMBER	Penghargaan Meritokrasi	Kementerian PAN dan RB RI	Pemerintah Kota Denpasar mampu menerapkan sistem merit sehingga meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
25.	DESEMBER	Penghargaan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Bali	Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan informasi public secara transparan.
26.	DESEMBER	Penghargaan Tingkat Nasional Audit Kasus Stunting	BKKBN	Pemerintah Kota Denpasar telah berkomitmen melakukan pencegahan stunting melalui audit stunting.
27	DESEMBER	Penghargaan Kota Peduli HAM	Kementerian Hukum dan HAM RI	Pemerintah Kota Denpasar dianggap berkomitmen dalam pemenuhan hak asasi manusia.
28.	DESEMBER	Penghargaan Survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2022.	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo RI	Pemerintah Kota Denpasar dinilai mampu melakukan literasi digital kepada kelompok masyarakat sasaran khusus seperti kelompok rentan, perempuan, peserta dan tenaga pendidik.

NO	BULAN	NAMA PENGHARGAAN	DARI	KETERANGAN
29.	DESEMBER	Penghargaan Khusus Atas Pemenuhan Maklumat Pelayanan	OMBUSMAN	Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan maklumat pelayanan dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
30.	DESEMBER	Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Kualitas Tertinggi terhadap Pelayanan Publik Tahun 2022	OMBUSMAN	Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Pemkot Denpasar menduduki peringkat kelima dengan nilai rata rata 93,27 kategori Kualitas Tertinggi dari seluruh kota di Indonesia.
31.	DESEMBER	Lencana Penghargaan Siddhakarya 2022	Pemprov Bali	Penghargaan Siddhakarya sendiri merupakan penghargaan Produktivitas di Indonesia, pada Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan kepada Perusahaan yang berhasil dalam meningkatkan Produktivitasnya selama 3 tahun berturut – turut dengan menerapkan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitasnya.
32.	DESEMBER	Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI	Pemerintah Kota Denpasar dianggap telah mampu menjadi Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak, tahun ini pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar, Desa/Lurah juga menerima penghargaan Gender Champion.
33.	DESEMBER	PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)	Pemerintah Kota Denpasar telah komitmen terhadap pemenuhan hak anak
34.	DESEMBER	Penghargaan Forum Anak Daerah Terbaik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)	Pemerintah Kota Denpasar mampu memberikan sumbangsih keterlibatan anak terhadap pembangunan
35	DESEMBER	Penghargaan Forum Anak Daerah Berbakat.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)	Keterlibatan Anak Denpasar dalam pembangunan

TABEL RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
			TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN								
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773	0,775	100,2587322	0,786	98,60050891	1. Program Pengelolaan Pendidikan
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :				100,25873			
SASARAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN								
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26	75,3	100,0531491	76,04	99,02682799	1. Program Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :				100,05315			
SASARAN 3 : MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT								

3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414	1.985.000	87,00744363	2.844.242	69,79012334	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Promosi Penanaman Modal 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 9. Program Pemasaran Pariwisata 10. Program Pengembangan Ekspor 11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 12. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 : 87,007444								
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN								
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,1	2,97	99,58571429	1,95	99,47692308	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 : 99,585714								
SASARAN 5 : MENINGKATKAN UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA								
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84	89,14	100,3376857	90,84	98,12857772	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Rata-rata Kinerja Sasaran 5 : 100,33769								
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS								

6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105,73	89,83	100,1503831	105,33	100,1471566	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
	Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :		100,15038					
SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN								
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4	91,82	98,30835118	94,6	97,06131078	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :		98,308351					
SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA								
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78	104,39	99,97435646	90,1	84,13984462	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penanganan Bencana
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :		99,974356					
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK								
9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66	88,77	101,266256	89,66	99,00736114	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Pencatatan Sipil 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
	Rata-rata Capaian Kinerja 9 :		101,26626					
SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI								
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	100,3576159	A (80)	94,7125	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan

												<p>Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>5. Program Kepegawaian Daerah</p> <p>6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100	WTP	100		100	<p>1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 : 100,17881											
SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN												
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03	5,08	99,99005964	6,62	99,99005964	6,62	100,2326284		100,2326284	<p>1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p>
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 : 99,99006											
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI												
13	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,68	105,1428571	3,9	105,1428571	3,9	94,35897436		94,35897436	1. Program Aplikasi Informatika
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 : 105,14286											
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH												
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif (55,68)	92,8	Sangat Inovatif	92,8	Sangat Inovatif	#VALUE!		#VALUE!	1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 : 92,8											
SASARAN 14 : MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR												
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58	58,92	98,89224572	64,86	98,89224572	64,86	90,84181314		90,84181314	<p>1. Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <p>4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>5. Program Kawasan Permukiman</p> <p>6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p>



Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar
Telp. (0361) 234831, Fax. (0361) 221534



www.denpasarkota.go.id
Email :
organisasi_Denpasar@yahoo.co.id



Denpasarkota
Bagor.denpasar